

**STUDI UNTUK PERBAIKAN PENGELOLAAN IRIGASI DAN PEMBERDAYAAN  
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR GUNA PENINGKATAN PROGRAM  
PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI**

**RINGKASAN**

**1. Hal Studi**

Tujuan Studi, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam *Scope of Work (S/W)* dan *Terms of Reference* yang ditanda-tangani dalam bulan September 1999 oleh Pemerintah Indonesia dan team persiapan Studi yang dikirim oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, atas nama Pemerintah Jepang, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyusun rencana-rencana tindakan perbaikan pengelolaan irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) guna peningkatan program penyerahan pengelolaan irigasi.
- 2) Untuk melaksanakan alih teknologi kepada tenaga personil *counterpart* Indonesia melalui *on-the-job training* selama Studi.

Studi bertujuan menyusun Rencana Tindakan untuk peningkatan program penyerahan O&M irigasi dengan memperhatikan aspek-aspek perbaikan pengelolaan irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, sejumlah item pekerjaan telah dispesifikasikan seperti disajikan pada Tabel S.1; yang berkaitan dengan Studi Fase-1 telah selesai dilaksanakan, dan yang lainnya akan dilaksanakan dalam Fase-2. Adapun kegiatan-kegiatan pokok selama dua fase itu dirumuskan sebagai berikut:

- Fase-1 Mininjau kembali studi-studi dan proyek-proyek sebelumnya yang menyangkut program penyerahan pengelolaan irigasi, melakukan studi lapang di lokasi-lokasi studi untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan kendala saat ini yang berkaitan dengan program penyerahan pengelolaan irigasi, dan membuat analisa dan kategorisasi masalah-masalah dan kendala tersebut.
- Fase-2 Berdasarkan analisa dan kategorisasi masalah-masalah dan kendala tersebut, merumuskan hipotesa cara-cara pemecahan yang tepat dengan menguji efektifitasnya melalui survei rinci di lapangan. Menyusul sesudah itu, suatu rencana tindakan akan disusun untuk program penyerahan O&M irigasi.

Sebagaimana disebutkan dalam S/W, lokasi studi terdiri dari 5 propinsi yaitu Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan total wilayah 157,000 km<sup>2</sup>, penduduk 80 juta, lahan beririgasi 1,911,000 ha dan P3A 18,000 unit. Sekitar 40% areal panen padi nasional terletak di propinsi-propinsi ini dengan produksi 45% padi. Kurang-lebih 42% dari jumlah penduduk di Indonesia tinggal di propinsi-propinsi ini.

Daftar jumlah P3A di Indonesia dan statusnya (1998)

Uraian	Sumbar	Jabar	Yogya	Jatim	NTB	Subtotal	Indonesia
<b>Berkembang</b>							
Berbadan hukum	5	0	0	31	35	71	502
Belum berbadan hukum	319	1,818	57	1,187	6	3,387	6,727
Subtotal	324	1,818	57	1,218	41	3,458	7,229
<b>Sedang berkembang</b>							
Berbadan hukum	0	0	0	0	0	0	312
Belum berbadan hukum	989	3,280	344	3,548	644	8,805	16,139
Subtotal	989	3,280	344	3,548	644	8,805	16,451
<b>Belum berkembang</b>							
Berbadan hukum	0	0	0	0	0	0	198
Belum berbadan hukum	800	2,800	305	1,876	211	5,992	14,248
Subtotal	800	2,800	305	1,876	211	5,992	14,446
<b>Total</b>							
Berbadan hukum	5	0	0	31	35	71	1,012
Belum berbadan hukum	2,108	7,898	706	6,611	861	18,184	37,114
Subtotal	2,113	7,898	706	6,642	896	18,255	38,126

Sumber : PU PPSDA

## **2. Latar-belakang Reformasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi**

Studi ini dilaksanakan pada saat-saat yang unik dalam sejarah Indonesia; saat negeri ini sedang berusaha membangun demokrasi yang stabil, berjuang untuk mengatasi akibat-akibat krisis moneter 1997 dan menyusun otonomi daerah. Dalam hubungan dengan sektor irigasi dampak dari pada hal-hal tersebut ialah bahwa Pemerintah tidak bisa lagi menggantungkan pada sumber pendanaan dari luar-negeri, sumber pendapatan Pemerintah dari dalam negeri perlu ditingkatkan dan perubahan diperlukan dari pembangunan yang berorientasi proyek ke pembangunan yang lebih mengedepankan partisipasi petani dan tidak tergantung pada bantuan Pemerintah.

Selama 20-an tahun yang lalu banyak pengeluaran dilakukan untuk infrastruktur irigasi yang secara keseluruhan meliputi jumlah investasi aset yang sangat besar. Pemerintah beberapa kali menyatakan bahwa biaya operasi dan pemeliharaan (O&P) aset ini menjadi berat, baik yang berupa kegiatan rutin maupun rehabilitasi per tahun, dan lebih dari satu dekade yang lalu memprakarsai beberapa upaya untuk mengendalikan biaya-biaya ini. Usaha-usaha dilakukan untuk memperbaiki O&P tahunan, mendorong petani agar memberikan perhatian lebih besar terhadap jaringan irigasi mereka, menyerahkan tanggung-jawab pengelolaan elemen-elemen tertentu dari jaringan irigasi kepada petani, mengenakan iuran penggunaan air dan membentuk perkumpulan petani pemakai air (P3A). Sementara semua prakarsa tersebut berhasil dilaksanakan namun dampak keseluruhannya tidaklah signifikan. Diyakini alasannya yang utama ialah pendekatan *top-down* yang hanya memberikan sedikit ruang untuk partisipasi petani dengan benar. Secara umum O&P tidak memberikan perbaikan yang berarti baik pada pihak petani maupun Pemerintah dalam penyediaan input yang cukup yang memungkinkan kegiatan rutin dilakukan dengan baik, dan jaringan masih saja membutuhkan rehabilitasi dalam jangka waktu yang jauh lebih pendek dari pada jika O&P dilakukan dengan baik. Para petani masih mengharapkan Pemerintah membantu mereka baik dengan O&P tahunan maupun rehabilitasi. Sementara jaringan-jaringan irigasi beroperasi pada tingkat di bawah optimal dan menjadi kendala bagi penghasilan petani maupun produksi pangan nasional.

Kebijakan-kebijakan yang sekarang diambil dengan maksud untuk lebih mengefektifkan banyak prakarsa yang telah dilakukan. Perbedaan-perbedaan penting antara kebijakan yang lama dan yang sekarang ialah:

- Bahwa sekarang Pemerintah diberi peran sebagai fasilitator katimbang pelaksana,
- Partisipasi petani diperlukan pada setiap tahap, dengan maksud agar mereka mengembangkan rasa memiliki, dan mau serta mampu mengambil tanggung-jawab yang lebih besar,
- P3A harus dibentuk dan bekerja secara demokratis dan semua dana O&P yang dikumpulkan oleh P3A harus dikelola oleh P3A,
- Ada beberapa prospek di mana Pemerintah, dalam jangka pendek sampai menengah, akan menyediakan dana untuk membantu irigasi seperti di masa lalu,
- Jaringan-jaringan irigasi hanya akan direhabilitasi jika (pengelolaan jaringan irigasi itu) telah diserahkan (kepada P3A).

Pemerintah saat ini sedang dibantu oleh *a Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL)* untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan prakarsa-prakarsa. Studi ini dilakukan bahu-membahu dengan kegiatan-kegiatan *WATSAL*, dan semua kegiatan yang diusulkan menggunakan hasil *WATSAL*, yang masih terus berkembang, sebagai rujukan.

### 3. Kegiatan Studi

Gambar kanan menyajikan alur kegiatan Studi dan metodologi yang digunakan pada setiap langkah.

#### 3.1 Studi Fase-1

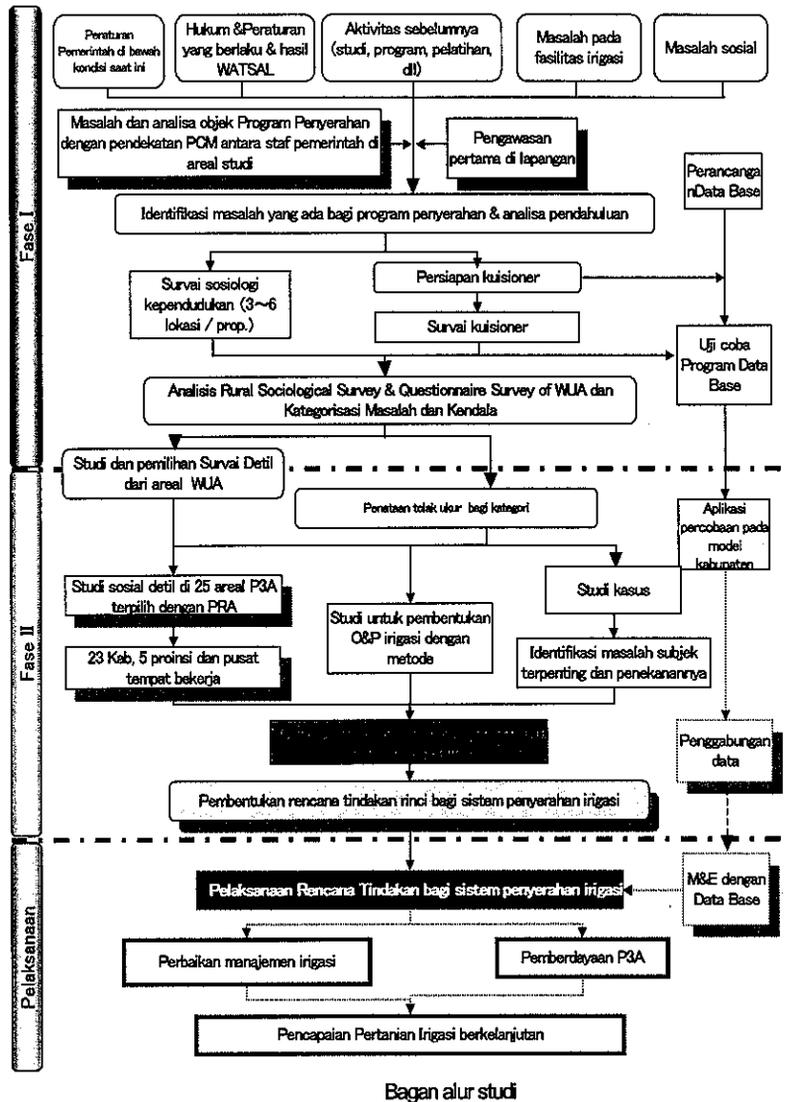
##### (1) Inception Report dan Setting Pelaksanaan Survei

Setelah penjelasan mengenai *Inception Report* disampaikan oleh Tim Studi JICA kepada lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia yang terkait, ke dua belah pihak mendiskusikan tentang isu-isu penting yang berhubungan dengan pelaksanaan studi, termasuk *the JICA Advisory Committee*. Asisten Deputi Urusan Irigasi di bawah Deputi Sumberdaya Air dari Menteri Negara Pekerjaan Umum (MENEG PU) ditunjuk dan dikonfirmasi sebagai *counterpart agency*, sementara Direktorat Sumberdaya Air Pedesaan di bawah Direktorat Jendral Pembangunan Pedesaan dari Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah

(KIMBANGWIL) menjadi anggota *Steering Committee* sebagaimana disebut dalam *Scope of Works. Minutes of Meeting* yang merupakan hasil penjelasan dan diskusi mengenai *Inception Report*, ditanda-tangani oleh Deputi Sumberdaya Air dari Meneg PU dan *Team Leader* dari Tim Studi JICA, dengan disaksikan oleh Direktorat Sumberdaya Air Pedesaan di bawah Direktorat Jendral Pembangunan Pedesaan dari KIMBANGWIL pada tanggal 13 April 2000. Sebuah kantor untuk Tim Studi JICA disediakan di Kantor Meneg PU.

##### (2) Pengumpulan dan analisis data dan informasi tambahan

Tim Studi JICA mengumpulkan informasi yang ada dari lembaga-lembaga terkait (Departemen dan Instansi Pemerintah, Bank Dunia, ADB dan lain-lainnya) mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan perundang-undangan dan peraturan, studi-studi dan proyek yang sedang berjalan, inventarisasi jaringan-jaringan irigasi dan perkumpulan-perkumpulan petani pemakai air, dan data-data statistik sosial-ekonomi dan pertanian. Kunjungan-kunjungan lapangan pendahuluan dilakukan ke lokasi-lokasi Studi untuk mengenalkan rencana Studi dan membangun hubungan dengan Instansi-Instansi Pemerintah yang terkait.



Bagan alur studi

### (3) Survei Lapangan Rinci (Survei Sosiologi Pedesaan & P3A dengan *Questionnaires*)

#### 1) Metodologi survei dan Pemilihan Lokasi

Survei Sosiologi Pedesaan dengan menggunakan metodologi *Rapid Rural Appraisal* dilakukan untuk mengidentifikasi dari sudut pandang petani kendala-kendala dan permasalahan yang mempengaruhi kelancaran penyerahan pengelolaan O&P jaringan irigasi. Dua puluh empat lokasi survei RRA dipilih, enam lokasi masing-masing di Sumatera Barat, Jawa Barat dan Jawa Timur, dan tiga lokasi masing-masing di DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Kriteria seleksi ialah 1) lokasi sepanjang saluran primer (hulu, tengah, hilir), 2) bentuk pengelolaan P3A (dikelola oleh satu unit P3A atau federasi dari beberapa unit P3A), 3) Status pengelolaan P3A (berfungsi baik, aktif, tidak aktif, belum dibentuk). Survei lapangan menggunakan baik wawancara maupun diskusi kelompok petani.

Rencana semula untuk melakukan survei dengan empat kuesioner per kabupaten di lima Propinsi diubah dengan mengurangi jumlah kabupaten tapi dengan menambah jumlah lokasi survei yang dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik yang sama. Tabel kanan menyajikan ringkasan hasil baik survei *RRA* maupun survei kuesioner.

Pemilihan kabupaten dan lokasi survey serta responden

Uraian	Kabupaten total	Kabupaten terpilih	Lokasi	Responden
Sumatera Barat	14	7	56	56
Jawa Barat	24	10	116	96
Yogyakarta	5	4	20	18
Jawa Timur	37	10	128	105
NTB	6	4	24	24
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>35</b>	<b>344</b>	<b>299</b>

Menyusul survei, lokakarya diselenggarakan di tiap Propinsi dan di Jakarta, di mana hasil-hasil survei Fase-1 ini dipresentasikan dan didiskusikan.

#### 2) Hasil Survei RRA

Sebagai kelanjutan lokakarya Propinsi dan Pusat, temuan-temuan *RRA* ditimbang dan dianalisa lebih jauh oleh Tim Studi dan Staf *Counterpart* dengan menggunakan metodologi *PCM*. Menjadi jelas dari hasil *RRA* yang tak berstruktur tersebut bahwa persepsi mengenai kendala dan permasalahan pengelolaan irigasi, pemberdayaan P3A dan program penyerahan pengelolaan irigasi sangat bervariasi di antara Propinsi. Persepsi mengenai kendala dan permasalahan tersebut mencakup isu-isu utama sebagai berikut:

##### Peran Pemerintah, bantuan, perundang-undangan dan peraturan

- Dilaporkan bahwa pendekatan Pemerintah yang terpusat dan top-down masih terjadi seperti di masa lalu. Demikian kebijakan dan langkah-langkah pemerintah setempat yang menyangkut pengelolaan irigasi tidak sesuai dengan kebutuhan setempat.
- Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan P3A tidak memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai kegiatan dan kemampuan P3A.

##### Pertanian, ekonomi, keuangan

- Penghasilan bersih dalam bentuk uang dari pertanian dan usaha tani beririgasi rendah dibandingkan dengan penghasilan dari luar pertanian karena, antara lain, luas lahan rata-rata per petani amat sempit.
- Generasi muda tidak mempunyai minat di bidang pertanian; mereka meninggalkan desa dan mengakibatkan kurangnya tenaga kerja untuk pertanian setempat. Upah buruh tani meningkat, dan bersama dengan biaya produksi lainnya yang tinggi menyebabkan produksi padi tidak menguntungkan terutama juga lantaran harga padi amat rendah.

### Jaringan irigasi, O&P, pengelolaan air

- Saluran-saluran dan fasilitas irigasi tak berfungsi dengan baik karena banyak alasan, mengakibatkan hilangnya air, kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan.
- Konflik di antara para pemakai air (antara pemakai air bagian tengah/hilir dengan hulu, antara petani pemakai air padi dan petani pemakai air non-padi) sering terjadi akibat kurangnya suplai air dan distribusi yang tidak adil.
- Rancangan teknis dan konstruksi yang tidak memadai merupakan salah satu sebab jaringan dan fasilitas irigasi PU lekas rusak. Pendekatan proyek, ketidak-terlibatan petani dalam perencanaan dan pelaksanaan, dan praktik-praktik kontrak pekerjaan konstruksi berpengaruh buruk terhadap kualitas bangunan dan tiadanya rasa memiliki dan rasa tanggung-jawab pemakai air setempat dalam memenuhi kewajiban mereka membayar iuran dan dalam O&P.

### Pengelolaan P3A, pengembangan kelembagaan

- Terlalu banyak organisasi petani yang ditumbuhkan oleh berbagai Instansi Pemerintah, lebih dari yang diharapkan petani.
- Pembentukan P3A dapat didasarkan pada kelembagaan tradisional irigasi yang ada yang diurus oleh *ulu-ulu* atau *ili-ili*. Para petani pemakai air setempat masih setia kepada *Ulu-ulu* mereka, dan pelaksanaan pengelolaan irigasi secara tradisional termasuk O&P tetap berjalan (pemeliharaan irigasi dengan cara gotong-royong, pembayaran iuran in-natura kepada *Ulu-ulu*, dst.)

### 3) Hasil-hasil Survei *Questionnaires*

Temuan-temuan yang diperoleh dari Survei *Questionnaires* di lapangan adalah sebagaimana diringkas sebagai berikut:

- a) Status sebagian besar P3A pada saat ini berada pada kategori 'sedang berkembang'. Sebagian besar P3A menyatakan telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-tangga (AD/ART). Kebanyakan P3A menyatakan bahwa mereka siap untuk menerima penyerahan pengelolaan irigasi (untuk mengambil tanggung-jawab O&P jaringan irigasi).
- b) Kebanyakan responden menyatakan bahwa mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan P3A, dan berpendapat bahwa pelayanan P3A baik (hal ini bertentangan dengan kesimpulan Bank Dunia, ADB dan lainnya, dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan di dalam lokakarya, bahwa sebagian besar P3A pada umumnya tidak aktif, dan mendapat sedikit saja dukungan dari para petani).
- c) Kebanyakan responden berpendapat bahwa pengelolaan air dengan P3A lebih baik dibandingkan dengan sistem tradisional di masa lalu. Pembagian air lebih baik di tiga propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan NTB, dan distribusi air yang lebih merata dinyatakan oleh sebagian besar P3A, dan lebih tertib dan ada kerja sama.
- d) Kebanyakan responden mengatakan bahwa pengurus P3A ditunjuk melalui pemilihan yang terbuka.
- e) Sebagian besar P3A menyatakan bahwa mereka mengadakan pertemuan-pertemuan, namun kebanyakan secara informal dan notulen jarang dibuat. Masalah-masalah penting yang dibahas mengenai pemeliharaan jaringan irigasi, termasuk, dalam banyak hal, saluran sekunder, manajemen dan pembagian air. Masalah lain yang dibahas ialah iuran pemakai air dan pembayarannya dan masalah-masalah sumberdaya manusia dan kelembagaan (organisasi dan kemampuan P3A, kepribadian dan integritas pengurus P3A, dst).
- f) Kebanyakan P3A yang biasanya berbasis pada satuan-satuan irigasi tersier, menyatakan bahwa mereka juga melakukan pemeliharaan saluran sekunder. Umumnya pemeliharaan tersebut dilakukan dengan *gotong royong* di mana petani menyumbangkan tenaga mereka.
- g) Kebanyakan P3A menyatakan bahwa sanksi-sanksi terhadap petani yang tak membayar iuran atau pelanggaran-pelanggaran dalam pemakaian air lainnya tidak pernah diterapkan.
- h) Menjawab pertanyaan mengenai aspek-aspek apa yang perlu dikembangkan, hal-hal penting yang mereka sebut ialah:
  - Kepercayaan, perhatian, dan bimbingan Pemerintah yang lebih baik, pelatihan dan penyuluhan.

- Suplai dan penyaluran air yang lebih baik, dan pengadaan air yang cukup untuk semua petani.
- Penguatan kelembagaan dan peningkatan sumberdaya manusia.
- Perbaiki jaringan irigasi.
- Akses ke sumber modal, pengelolaan dana yang lebih baik, dan harga hasil pertanian yang lebih baik.

#### (4) Kategorisasi Masalah dan Kendala

##### 1) Pendekatan yang Digunakan untuk Analisa Masalah Partisipatif

Berdasarkan hasil-hasil dari dua macam Survei Lapangan itu maka serangkaian lokakarya propinsi dilakukan (pada akhir bulan Agustus dan awal September), yang dihadiri petugas Pemerintah dan petani setempat, untuk memberikan umpan-balik terhadap hasil-hasil survei lapangan dan memungkinkan mereka ikut dalam analisa masalah dengan menggunakan metodologi *PCM*. Sebuah lokakarya di tingkat nasional juga diselenggarakan dengan tujuan mengidentifikasi isu-isu yang secara umum berlaku pada tingkat nasional, membuat analisa masalah, dan tukar-menukar informasi di antara propinsi yang bersangkutan. Lokakarya itu yang berlangsung pada tanggal 7 September 2000 dihadiri oleh para petugas Pemerintah daerah dan pusat dan petani. Hasil-hasil dari rangkaian lokakarya itu lalu diuji dan dianalisa bersama-sama dengan pihak *counterpart*, dan isu-isu dikelompokkan menjadi empat kategori utama yang mencakup aspek-aspek administrasi (termasuk perundang-undangan dan peraturan), pengelolaan irigasi, pengelolaan P3A dan ekonomi pertanian.

##### 2) Temuan-temuan penting dari Analisa Masalah

- a) Ada tradisi yang panjang dalam pengelolaan air di lingkungan masyarakat petani di Indonesia (khususnya pada pertanian padi lahan basah), yang berkembang sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat.
- b) Adalah kenyataan yang tak bisa dibantah bahwa pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah, termasuk program penumbuhan dan pembinaan P3A, menggunakan pendekatan *top-down*, di mana inisiatif dan pendanaan datang dari atas, dan kemajuan proyek cenderung berorientasi pada target. Bagaimanapun harus dikatakan bahwa pelaksanaan program P3A terlalu birokratis dan seragam, dan tidak tertuju pada permasalahan yang nyata-nyata dihadapi petani dan masyarakat pedesaan. Pendekatan program P3A yang kaku itu tidak memungkinkan adanya fleksibilitas yang diperlukan terhadap kondisi fisik dan tradisi yang beraneka ragam. Dominasi Pemerintah amat kuat.
- c) Keberadaan P3A kebanyakan hanya nama saja dan tidak aktif. Para petani belum menyadari pentingnya P3A dan/atau memandangnya dengan apatis, dan hanya sedikit saja tahu tentang program penyerahan pengelolaan irigasi<sup>1</sup>. Dukungan petani terhadap P3A umumnya lemah karena organisasi dibentuk dari atas tanpa partisipasi petani.
- d) Pendaftaran dan status sesuatu P3A dalam penyerahan pengelolaan irigasi tidak mengindikasikan efektifitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- e) Kebanyakan petani berpendapat bahwa sifat formal dan birokratis P3A dan kenyataan bahwa posisi-posisi kunci diisi oleh pemuka-pemuka desa menunjukkan bahwa tujuan utama organisasi ialah untuk mengumpulkan dana dengan sedikit manfaat bagi petani itu sendiri. AD/ART – anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah-tangga (ART) – tak dipahami dengan jelas. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan air kurang ditegakkan, karena sanksi-sanksi peraturan itu tidak dirumuskan dengan partisipasi atau tidak dengan persetujuan

---

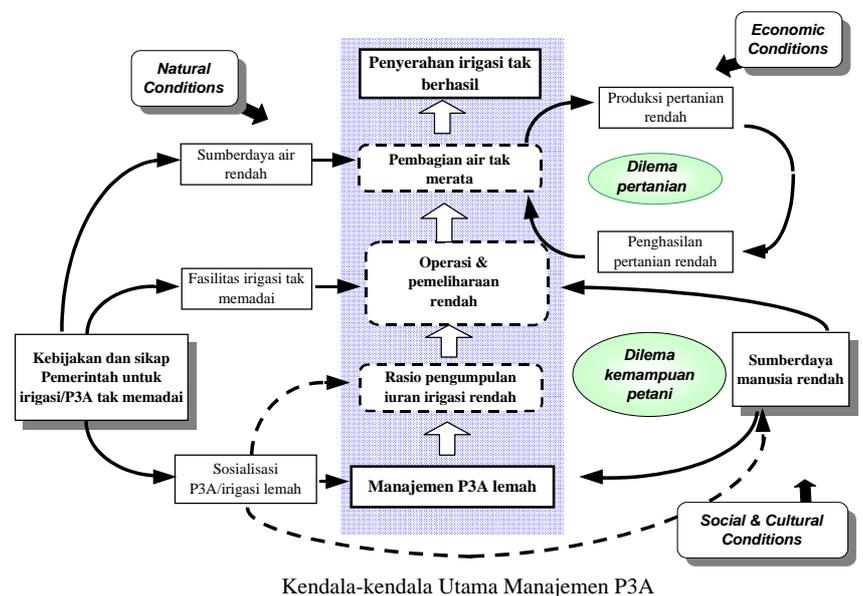
<sup>1</sup> Kesadaran lebih tinggi di Jawa Timur dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain yang distudi.

para pemakai air.

- f) Pada umumnya petani bingung dengan banyaknya organisasi lain di tingkat desa, dan lebih senang dengan lembaga yang sederhana dan sudah mapan di desa seperti *kelompok tani* dan *koperasi*. Pada umumnya petani lebih menyukai manajemen yang sederhana. Di Sumatera Barat banyak petani mempertanyakan relevansi P3A formal terutama di jaringan irigasi kecil di mana air sudah dikelola dengan baik.
- g) Meskipun petani mempunyai potensi untuk mengelola O&P jaringan tersier yang telah diserahkan ( di beberapa tempat perbaikan saluran dan bangunan dilakukan dengan *gotong royong*), tetapi pada kenyataannya keterlibatan mereka dalam O&P amat rendah. Petani umumnya tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan konstruksi jaringan irigasi, dan banyak proyek tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana (dalam arti waktu, biaya, rancangan teknis, dan mutu) –dan ini berakibat pada tiadanya kepercayaan di kalangan petani.
- h) Mutu kondisi fisik banyak jaringan irigasi amat rendah (misalnya, banyak pintu pembagi yang tak berfungsi) dan air hilang karena bocor. Bila fasilitas irigasi tak pernah diperbaiki dengan benar, P3A umumnya tidak aktif dan sulit mengumpulkan iuran.
- i) Konflik terjadi di mana air tidak dialokasikan atau didistribusikan dengan adil di antara pemakai air yang berbeda (misalnya, antara petani hulu dan hilir, antara petani dan rumah-tangga /industri, dan antara petani padi, petani ikan, peternak itik, petani tembakau, petani tebu dst). Juga kesalah-pahaman bisa terjadi bila petunjuk teknis O&P dari Instansi terkait (Dinas PU Pengairan dan Dinas Pertanian) tidak benar dan tidak terkoordinir, karena hal itu bisa mengakibatkan perubahan pola tani dan waktu tanam dan selanjutnya menurunkan hasil panen.
- j) Keluhan dari kebanyakan petani hilir ialah pemakaian air yang terlalu banyak dari petani hulu.
- k) Terdapat kebingungan tentang wilayah kerja P3A. Awal mulanya P3A didasarkan pada batas administratif desa<sup>2</sup>. Bagaimanapun hal itu tidak efektif untuk partisipasi petani pemakai air yang sekarang cenderung terpecah di wilayah yang lebih luas (termasuk desa-desa lainnya), dan karenanya kini lebih didasarkan pada satuan-satuan irigasi tersier.
- l) Keberhasilan P3A amat tergantung pada sikap dan motivasi pemuka desa, partisipasi masyarakat setempat, dan kesadaran para petani anggotanya.
- m) Jaringan irigasi teknis yang dibangun Pemerintah harus menjadi prioritas program penyerahan pengelolaan irigasi.
- n) Terdapat masalah pengelolaan O&P jaringan irigasi yang lebih tinggi (primer dan sekunder) yang masih tergantung pada bantuan Pemerintah.

### 3) Ringkasan Analisa Masalah

Semua diskusi dan fakta yang ditemukan di lapangan disarikan ke Gambar S.2 dalam bentuk diagram pohon masalah. Latar-belakang sosial/hirarki administratif, pengaruh sosial/sejarah dan perubahan sosial/ekonomi dewasa ini dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan



<sup>2</sup> Hal ini masih menjadi aturan di Jawa Timur.

sebab-akibat yang kompleks antara aspek-aspek yang bersangkutan. Sehingga menjadi jelas bagaimana ke dua pihak baik Pemerintah maupun petani menghadapi situasi sehari-hari yang rumit. Dengan memperhatikan subyek-subyek studi ini dan pengujian-pengujian sebagaimana tersebut di atas maka 4 isu pokok diusulkan sebagai klasifikasi masalah yaitu: 1) Peran Pemerintah, perundang-undangan dan peraturan, 2) Pengelolaan P3A dan aspek kelembagaan, 3) O&P Irigasi dan pengelolaan air, dan 4) Pertanian, ekonomi dan keuangan.

Isu-isu yang diidentifikasi di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor terpenting yang berkaitan dengan perbaikan manajemen irigasi ialah:

- a) bagaimana mengembangkan konsep mengenai O&P dan manajemen irigasi, dan
- b) bagaimana memberdayakan petani sebagai pengguna jaringan irigasi dan petugas pemerintah sebagai penyedia informasi dan abdi masyarakat.

Sebagai hasil dari pemberdayaan, P3A lama yang dibentuk Pemerintah dengan pendekatan *top-down*, dapat dibentuk kembali menjadi P3A yang mandiri, dengan mana petani berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi dengan pihak Pemerintah (*joint management*), melalui gabungan-gabungan dari P3A yang telah diberdayakan tersebut. Kajian mengenai pemecahan masalah dan kendala serta pengujiannya di lapangan akan difokuskan pada dua isu tersebut.

#### (5) Pemilihan lokasi untuk Survei Rinci P3A

Studi Fase-2 dijadualkan, sebagaimana telah disebut dalam *Inception Report*, untuk merumuskan hipotesa pemecahan masalah, melakukan survei rinci guna pengujian hipotesa itu, dan membuat *Action Plans* (Rencana Tindakan).

Pemilihan lokasi untuk survei rinci Fase-2 itu dilakukan dengan memperhatikan hasil kategorisasi masalah dan kendala, pelaksanaan proyek IDTO Bank Dunia di Jawa, dan pandangan dari pihak *counterparts*, sebagaimana dapat diperiksa pada tabel di samping kanan ini. Spesifikasi dari pada lokasi-lokasi dan jaringan irigasi yang dipilih dilakukan dan ditetapkan pada awal pelaksanaan Studi Fase-2.

**Pemilihan lokasi**

Lokasi untuk	Sumbar	Jabar	Yogya	Jatim	NTB
P3A berkembang	1	1	1	1	1
Belum ada P3A	2	1	1	1	2
P3A	2	1	1	1	2
P3A Gabungan	2	1	1	1	1
<b>Total</b>	7	4	4	4	6
Total semua	25				

Catatan: termasuk lokasi RRA fase I

#### (6) Rancangan Database

Sebagai alat untuk membantu percepatan pemberdayaan P3A, program penyerahan dan perbaikan pengelolaan irigasi, suatu program database untuk organisasi petani pemakai air telah disusun selama Fase-1 Studi. Gambar S.1 memperlihatkan alur persiapan dan pengumpulan data yang digunakan dalam database itu, sementara Tabel S.3 menyajikan ringkasan menu data dari databse P3A tersebut.

### 3.2 Studi Fase-2

#### (1) Analisa Tujuan dan Pemecahan Masalah

Tugas pertama Fase-2 ialah menyusun analisa tujuan berdasarkan kategorisasi masalah dari isu-isu yang diidentifikasi dalam Fase-1 dan merumuskan hipotesa pemecahan masalah serta menentukan prioritas-prioritasnya. Tiga kelompok hipotesa atau rancangan Rencana Tindakan yang berkaitan satu sama lain dikembangkan sebagai berikut:

- Peningkatan penghasilan petani,
- Peran Pemerintah,
- Pemberdayaan P3A dan penyerahan tanggungjawab O&P.

Ke tiga kelompok hipotesa itu kemudian dijabarkan ke dalam empat format *Project Design Matrix (PDM)* yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- Aspek-aspek Pemerintah, P3A dan O&P,
- Aspek-aspek program pengembangan pertanian untuk petani,
- Aspek-aspek program pengembangan pertanian untuk bantuan Pemerintah,
- Aspek-aspek persiapan sosial.

PDM pemecahan masalah tersebut lalu didiskusikan di tingkat pemerintah pusat.

## (2) Verifikasi lapangan pemecahan masalah

Sesudah itu langkah berikutnya ialah melakukan verifikasi gagasan-gagasan tersebut di tingkat lapangan sambil melakukan survei lapangan di 25 jaringan irigasi yang dipilih di 23 kabupaten yang tersebar di 5 propinsi..

Empat pendekatan yang berbeda di gunakan dalam melakukan verifikasi itu, sebagai berikut:

- Pengamatan di lokasi-lokasi survei lapangan terperinci,
- Survei lapangan terperinci,
- Studi kasus,
- Uji-coba penyusunan rencana O&P jaringan irigasi dengan pendekatan *bottom-up*.

### 1) Pengamatan di lokasi-lokasi survei lapangan terperinci

Pengamatan lapangan di lokasi-lokasi survei rinci dilakukan oleh anggota-anggota Tim Studi yang difokuskan pada pengumpulan pendapat para pemuka desa, pengurus P3A, dan responden lain setingkat itu.

### 2) Survei lapangan terperinci

LSM direkrut untuk melakukan survei lapangan terperinci selaku Tim Studi Propinsi. Ini meliputi survei pendahuluan dan survei informan kunci dengan menggunakan metodologi *Participatory Rural Appraisals (PRA)* di 25 lokasi yang dipilih. Lokakarya *PRA/PCM* dilaksanakan di lokasi survei untuk menguji validasi data informan kunci maupun *PRA* serta untuk melakukan verifikasi hipotesa pemecahan masalah.

Tim Studi Propinsi kemudian menyiapkan laporan mengenai survei lapangan dan lokakarya *PRA/PCM* yang mereka lakukan tersebut dan dipresentasikan di lokakarya tingkat kabupaten yang berjumlah 23. Tujuannya ialah untuk: 1) menyusun PDM, dengan menggunakan hasil-hasil *PRA*, 2) melakukan validasi terhadap PDM yang telah disusun dan alokasi tanggungjawab, dan 3) melakukan verifikasi terhadap hipotesa pemecahan masalah. Lokakarya dengan agenda yang sama dilakukan pada tingkat propinsi (5 lokakarya) dan di tingkat pusat.

Isu-isu utama dan tindakan-tindakan yang direkomendasikan dari diskusi pada berbagai tingkat diidentifikasi dan dibuat ringkasan. Tabel 3.2.4 dalam laporan, misalnya, menyajikan ringkasan mengenai prioritas-prioritas tindakan yang direkomendasikan pada lokakarya tingkat jaringan irigasi

dan tingkat kabupaten. Tindakan-tindakan yang disebutkan di sini dengan sendirinya muncul dalam keseluruhan Rencana Tindakan yang akan didiskusikan kemudian.

### 3) Studi kasus

Satu studi kasus pengalaman dan lima studi kasus lainnya telah dilakukan.

Studi kasus pengalaman yang dimaksud ialah mengenai pemeliharaan dan rehabilitasi di jaringan irigasi Pekatan, Nusa Tenggara Barat, di mana penelusuran jaringan irigasi secara rinci dilakukan bersama-sama dengan para petani. Rincian pekerjaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi disusun dan standar operasional beserta kapasitas jaringan tersier diuraikan.

Studi-studi kasus yang lain meliputi topik-topik berikut ini: 1) Rehabilitasi jaringan irigasi, 2) Iuran pemakai air 3) Pelatihan partisipatif, 4) Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan, 5) Monitoring dan evaluasi P3A, dan 6) Fungsi P3A untuk mendukung pertanian beririgasi.

### 4) Uji-coba penyusunan rencana O&P irigasi dengan menggunakan pendekatan *bottom-up*.

Uji-coba penyusunan rencana O&P dengan pendekatan *bottom-up* dilakukan di jaringan irigasi Cipalebuh Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jaringan irigasi ini, di mana terdapat lima P3A yang aktif tetapi masih memerlukan pemberdayaan, mencatat iuran O&P yang mendekati rata-rata, belum mempunyai sistem pengalokasian air yang adil, dan memerlukan beberapa rehabilitasi. Sebagai bagian dari kegiatan, anggota P3A jaringan irigasi ini di bawa ke jaringan irigasi lain di kabupaten yang sama, yakni jaringan irigasi Cimanuk. Di sini, unit-unit P3A telah membentuk suatu Gabungan dan telah mencapai keberhasilan tertentu. Ada pelaksanaan O&P yang lebih baik, pengumpulan iuran O&P yang meningkat, pembentukan koperasi dalam hubungan kerja sama dengan Gabungan P3A, dan rehabilitasi beberapa bagian dari jaringan irigasi secara partisipatif.

Diskusi-diskusi secara mendetail dilakukan dengan pengurus dan anggota P3A serta orang-orang kunci setempat dengan tujuan menguji hubungan sebab-akibat permasalahan dan rencana tindakan yang diusulkan dan mencari jalan untuk melaksanakan rencana tindakan tersebut dengan cara yang praktis dan berkelanjutan. Asistensi diberikan kepada anggota P3A yang mendapat manfaat dari kunjungan ke jaringan irigasi Cimanuk yakni dari diskusi serta saran yang mereka berikan.

### 5) Verifikasi hipotesa pemecahan masalah

Berdasarkan hasil-hasil dari berbagai survei/studi tersebut di atas, pemecahan masalah aspek-aspek irigasi diverifikasi menjadi pemecahan masalah yang bisa diterima dan dilaksanakan. Sementara pemecahan masalah untuk aspek-aspek pertanian beririgasi dinilai tidak efektif di bawah kondisi kebijakan pertanian yang berlaku sekarang.

## 4 Rencana Tindakan

### 4.1 Pengantar

Tujuan dari Studi ini ialah membuat referensi untuk perbaikan pengelolaan irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) guna peningkatan penyerahan irigasi dengan menggunakan kerangka kerja WATSAL. Kegiatan ini telah dilakukan dengan hati-hati demi berjalannya penelitian dan perkembangan di lapangan, di mana istilah P3A yang kami gunakan merujuk pada satuan (baik satuan desa maupun satuan irigasi tersier) kelompok. Dari pendekatan dasar inilah semua inisiatif kegiatan yang diambil termasuk penyusunan Rencana Tindakan dikembangkan. Dalam menyusun Rencana tersebut proses dari kegiatan yang dikembangkan bertingkat itu dilakukan: review, identifikasi kendala dan masalah, analisa, hipotesa, dan konfirmasi, dengan menggunakan kondisi di lapangan baik aspek fisik, kelembagaan, organisasi maupun keuangan. (Figur S.3 dan S.4). Perlu dicatat bahwa semua proses dalam Studi ini dan usulan dari padanya dikembangkan dari analisa kebutuhan (AKNOP) dan metoda-metoda partisipatori. Proses ini telah dijalankan dengan sukses pada tiap tingkat administrasi pemerintahan dari lapangan sampai ke tingkat Nasional. Dalam proses ini istilah P3A digunakan secara generik, untuk menunjuk semua kelompok yang dibentuk untuk pengembangan petani pemakai air.



Cara untuk Perumusan Rencana Tindakan

Guna menambah kejelasan dan penekanan pada pelbagai bagian laporan, digunakan istilah-istilah yang lebih spesifik seperti GP3A (Gabungan P3A yakni satuan-satuan P3A yang dikelompokkan) dan IP3A (Induk P3A yakni gabungan-gabungan P3A yang dikelompokkan berdasarkan jaringan irigasi sekunder). Untuk menghindari kesalah-pahaman istilah P3A dipakai dalam laporan secara generik untuk semua tingkatan kelompok.

Rencana Tindakan yang direkomendasikan dibagi menjadi tiga bagian. Dua di antaranya yaitu mengenai irigasi dan isu-isu yang berkaitan erat dengan itu, terdiri dari kegiatan persiapan dan kegiatan-kegiatan pokok; dan satunya lagi berkaitan dengan aspek-aspek pertanian.

Usaha telah dilakukan untuk memasukkan sebanyak mungkin pemecahan masalah yang berkaitan dengan keirigasian ke dalam Rencana Tindakan, dan mengaturnya sebagai bagian paket atau kegiatan. Sebagaimana tampak pada Figur 2 terdapat urutan yang logis dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan tanpa tumpang-tindih satu dengan yang lain.

Meskipun berbagai kegiatan itu berkaitan erat satu sama lain namun bisa dikelompokkan menjadi sepuluh paket kegiatan. Beberapa di antaranya dirumuskan untuk isu-isu yang terbatas cakupannya, beberapa yang lain ditujukan pada lapangan yang lebih luas. Dianjurkan agar daftar kegiatan pada tahap awal ini dilihat secara fleksibel, dan jika ada isu-isu lain yang penting atau jika dipandang perlu untuk mengatur kembali komponen-komponen antara kegiatan yang satu dengan yang lain, hendaknya modifikasi dimungkinkan terhadap rencana itu.

Kegiatan yang direkomendasikan berkaitan dengan irigasi adalah sebagai berikut:

### ***Kegiatan yang direkomendasikan berkaitan dengan irigasi***

Kegiatan persiapan:

- Action 1: Penyadaran mengenai Kebijakan Pemerintah di kalangan Aparat Pemerintahan,
- Action 2: Inventarisasi jaringan irigasi dan P3A,

Kegiatan pokok:

- Action 3: Penyadaran dan peningkatan kemampuan di tingkat P3A,
- Action 4: Pelatihan pengurus P3A,
- Action 5: Memulai Bantuan,
- Action 6: Pembentukan dan pembentukan kembali P3A, Gabungan P3A dan Induk P3A dan bantuan modal awal,
- Action 7: Dana perbaikan irigasi di tingkat Kabupaten,
- Action 8: Peningkatan O&P dan *Joint Management*,
- Action 9: Penarikan iuran pengelolaan irigasi dan bantuan Pemerintah,
- Action 10: Rehabilitasi jaringan irigasi,
- Action 11: Monitoring dan Evaluasi.

Saat *Action Plan* atau Rencana Tindakan itu dilaksanakan adalah penting untuk ‘memasang papan-papan penunjuk jalan bagi kereta-api yang sedang berjalan’. Tujuannya perlu mencakup memperkuat kegiatan yang dalam beberapa hal sudah berjalan, meski banyak di antaranya bersifat percontohan atau skalanya terbatas, dan pengenalan konsep baru belum dicoba.

Situasi dalam negeri dewasa ini sangat labil. Struktur departemen Pemerintah sedang berubah, staf sedang dipindah-pindahkan, otonomi daerah belum berjalan dengan baik, bantuan yang diharapkan dari luar negeri sebagian besar tidak diindahkan, dan sejumlah perundang-undangan tertentu yang amat penting belum dikeluarkan. Beberapa hasil kegiatan *WATSAL* belum difinalisir. Pada saat yang sama terjadi ketidak-pastian perkembangan politik, tindak kejahatan meningkat dan rasa hormat kepada yang berwenang menurun.

Rencana Tindakan harus berjalan dalam kondisi seperti itu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sedang berubah tersebut. Adalah juga perlu hati-hati bagaimana menetapkan target, upaya yang perlu dilakukan dan bagaimana pendanaannya. Hal itu akan memerlukan, misalnya, kepentingan untuk memastikan bahwa sebagian besar tenaga yang telah dilatih akan tetap berada pada posisi dan jabatannya selama proyek berjalan.

Sementara bantuan direkomendasikan pada setiap tingkat, ada semacam hubungan penting yang telah terjadi dan diantisipasi sebagai bagian dari pekerjaan rutin yang akan berjalan saat dan bila diperlukan. Perihal penyuluhan pertanian misalnya, kegiatan ini telah berjalan lama dan di banyak tempat telah memberikan sumbangan yang berarti. Sementara sebagian mendorongnya untuk bekerja sama erat dengan usaha-usaha pembangunan yang terpusat pada jaringan irigasi tertentu, tak dipikirkan bahwa pada setiap tingkat perkembangan input-input lain yang menentukan akan dibutuhkan dari proyek.

## 4.2 Kegiatan rinci Rencana Tindakan

Uraian singkat mengenai berbagai kegiatan diberikan di bawah ini.

### (1) Kegiatan Persiapan.

Tiga kegiatan berikut ini akan dilakukan jauh dari jaringan irigasi dan masyarakat di mana petani yang bersangkutan berada. Kegiatan-kegiatan itu juga, di wilayah-wilayah tertentu, perlu dilakukan sebelum kegiatan-kegiatan lainnya bisa dilakukan. Dengan berkembang horison proyek wilayah-wilayah baru perlu dimasukkan dan kegiatan persiapan perlu dilakukan.

Perlu diakui bahwa dalam hubungan dengan otonomi daerah kebanyakan kegiatan-kegiatan ini perlu disesuaikan dengan implikasi dari kebijakan baru itu, dan proyek perlu disiapkan agar menyesuaikan diri dengan yang berwenang di tingkat kabupaten untuk meyakinkan bahwa program pembangunan mereka secara keseluruhan perlu terintegrasi dan efisien.

#### **Action 1: *Penyadaram tentang kebijakan Pemerintah di kalangan Aparat Pemerintahan***

Aparat Pemerintahan sudah harus lebih dulu sadar mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Akan menjadi penting artinya untuk proyek ini bila semua aparat Pemerintahan yang terlibat mempunyai pemahaman yang jelas mengenai kebijakan Pemerintah yang berlaku sekarang dan sadar akan peran yang diharapkan dalam pelaksanaan proyek. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri dan menyatakan kebutuhan mereka akan peningkatan kemampuan dan pelatihan, dan berpikir apakah ada tempat untuk mereka dalam proses pembangunan yang sedang berubah itu. Banyak aparat pemerintahan yang mengalami keprihatinan semenjak terjadinya krisis keuangan dan pengurangan anggaran belanja Pemerintah, sementara banyak lagi yang mendapatkan kenyataan bahwa posisi mereka tidak lagi menentu. Tanpa adanya niat kerjasama dari aparat Pemerintahan keberhasilan proyek ini akan sangat tidak bisa dipastikan.

Kegiatan ini akan membantu upaya penyadaran di kalangan aparat Pemerintahan dari tingkat Propinsi sampai ke tingkat Kecamatan, mendorong mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka dan menyediakan hubungan melalui mana mereka akan bisa menemukan pihak-pihak yang akan mampu membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Salah satu komponen kegiatan ini ialah pembentukan suatu Badan yang mengkoordinir bantuan yang diperlukan untuk P3A di tingkat Kabupaten (*Kabupaten Co-ordinated WUA Support Group*) di kabupaten-kabupaten yang tercakup dalam proyek ini.

#### **Action 2: *Inventarisasi jaringan irigasi dan P3A***

Tanpa inventarisasi jaringan irigasi yang terperinci dan akurat akan sangat sulit untuk membuat rencana penyadaran masyarakat. Meski banyak informasi detail tersedia dan inventarisasi, tanpa peta terperinci, telah dibuat sekitar satu dekade yang lalu, dipandang penting bahwa suatu inventarisasi yang baku secara nasional perlu dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang telah ada.

Direkomendasikan agar kegiatan tersebut meliputi enam sub-kegiatan sebagai berikut:

- Program inventarisasi jaringan irigasi menengah dan besar (> 150 ha),
- Program inventarisasi jaringan irigasi kecil (< 150 ha),
- Program penggunaan database sumberdaya air yang berhubungan dengan aset nasional,
- Program penyediaan inventarisasi P3A,
- Program *assessment* jaringan irigasi,
- Program lomba penyusunan proposal rehabilitasi jaringan irigasi.

Inventarisasi P3A perlu dibuat dengan menggunakan fasilitas database P3A yang telah disiapkan dengan bantuan Studi ini, dengan input dari Fase-1 dan Fase-2 baik berupa sistimnya, pelatihan untuk operatornya maupun modifikasinya sesudah uji-coba di lapangan.

## (2) Kegiatan pokok

Saat keputusan untuk mencakup sesuatu jaringan irigasi dan P3A ke dalam proyek telah dibuat maka dalam pelaksanaan urutan kegiatan di bawah ini perlu diikuti.

Kondisi akan bervariasi menurut jaringan irigasi; P3A mungkin aktif, agak aktif, tidak aktif atau tidak ada, sementara beberapa P3A membutuhkan penguatan dan yang lain perlu dirombak dan dibentuk kembali. Beberapa jaringan irigasi masih dalam kondisi baik, dan banyak lagi lainnya memerlukan rehabilitasi. Beberapa jaringan irigasi benar-benar siap untuk diserahkan, dan lainnya jauh dari posisi ini.

Sesuai dengan kebutuhan spesifik setempat lalu perlu diputuskan kegiatan mana yang relevan dengan kebutuhan jaringan irigasi tertentu. Di mana hanya terdapat sedikit atau tidak ada kegiatan P3A sama sekali maka mungkin perlu untuk mulai dari awal dengan program penyadaran P3A. Untuk jaringan irigasi yang telah berkembang dengan lebih baik adalah penting untuk menentukan kegiatan apa yang relevan dan melaksanakannya sesuai dengan itu.

Dimulai dari awal kegiatan pokok yang diusulkan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### **Action 3: Penyadaran dan peningkatan kemampuan lembaga pada tingkat P3A**

Ini adalah kegiatan yang akan diperlukan bila sebagian besar petani tampak belum sadar akan kebijakan Pemerintah mengenai penyerahan pengelolaan irigasi, dan implikasi dari pada ini bagi mereka ialah pembentukan P3A, penyerahan tanggungjawab O&P secara bertahap kepada petani dan sebagai konsekuensi dari itu pengurangan subsidi Pemerintah, dan prinsip-prinsip *joint management*. Banyak petani juga perlu dibuat sadar akan kebijakan baru tentang rehabilitasi sesudah jaringan irigasi diserahkan kepada mereka.

Proses ini mungkin sangat lambat dan bisa dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengurus P3A, bila mereka telah ada, dan/atau petani. Sebelum para petani mampu melakukan kegiatan secara positif dalam rangka pembentukan P3A yang benar suatu pendampingan mungkin diperlukan.

### **Action 4: Pelatihan pengurus P3A dan tenaga lain yang potensial**

Saat kegiatan mulai di suatu jaringan irigasi tertentu, jika P3A yang layak atau potensial untuk menjadi layak ada, maka perlu dimungkinkan untuk memastikan pelatihan bagi pengurus atau mungkin lainnya yang benar-benar memerlukannya.

Dalam mengantisipasi kebutuhan akan training, Staf Pemerintah pada tingkat Kabupaten perlu disiapkan dalam arti telah lebih dulu mengikuti latihan atau penyegaran bagaimana membawakan modul-modul training dengan tepat dan menguji-cobanya dalam konsisi tertentu di lapangan.

Sementara kebutuhan-kebutuhan training dapat diantisipasi sebelumnya, adalah penting bagi Staf Pemerintah untuk mengambil posisi di mana mereka dapat menerima permohonan-permohonan akan asistensi mengenai aspek-aspek di mana mereka tak disiapkan sebelumnya. Kegiatan penyadaran untuk kalangan aparat Pemerintahan karenanya perlu mengambil bagian dalam persiapan untuk hal-hal seperti ini.

### **Action 5: Memulai Bantuan**

Termasuk juga dalam kegiatan ini ialah penyediaan bantuan keuangan guna memungkinkan P3A mampu memulai kegiatannya di tahap-tahap awal pembentukannya. Ini adalah salah satu bentuk bantuan di mana diperlukan keseimbangan antara bentuk dan jumlah bantuan yang cukup untuk memungkinkan terjadinya dampak yang positif, sementara pada saat yang sama perlu dihindarkan terjadinya ketergantungan kepada Pemerintah, sesuatu yang dewasa ini telah menggejala luas di masyarakat.

**Action 6: Pembentukan dan pembentukan kembali P3A,  
Gabungan P3A, Induk P3A dan bantuan modal awal**

Diakui bahwa saat ini sebanyak 35,000 lebih P3A yang dikategorikan sudah berkembang pada kenyataannya adalah hanya nama. Banyak lagi lainnya berdiri di atas kaki yang salah dan dengan bentuknya sekarang tidak mampu berfungsi sebagaimana P3A yang seharusnya diharapkan. Juga diperkirakan bahwa lebih dari separo daerah beririgasi di negeri ini tidak ada P3Anya.

Suatu pendekatan baru dalam pembentukan P3A direkomendasikan, di mana petani yang membuat keputusan dan demokrasi menjadi mottonya. Petani akan didorong untuk membentuknya dari lembaga-lembaga tradisional yang ada di tempat yang telah dikenal baik oleh mereka dengan membangunnya menjadi organisasi yang mereka pandang tepat. Di beberapa wilayah pembubaran P3A perlu dilakukan di mana P3A yang ada tidak mungkin lagi untuk diharapkan menjadi P3A yang layak. Di manapun akan ada kemungkinan untuk mulai dengan struktur yang sederhana, kemudian memodifikasinya dan secara bertahap mengembangkannya menjadi unit yang layak. Banyak P3A telah dibentuk dengan top-down dengan petugas Pemerintah yang ditunjuk untuk menduduki posisi-posisi kunci. Sementara proses pembentukan sudah salah, banyak juga staf yang bekerja dengan penuh pengabdian dan memainkan peran dengan efektif; dalam hal demikian tentulah mereka akan terpilih untuk menduduki posisi-posisi yang diperlukan saat prosedur pembentukan yang demokratis dijalankan.

Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk membantu petani membentuk P3A yang layak dan, di mana diperlukan, saat unit-unit P3A telah berfungsi dengan baik, untuk membantu pembentukan Gabungan P3A serta Gabungan P3A di tingkat jaringan irigasi. Masukan yang utama ialah berupa bantuan teknis dan dukungan masyarakat.

**Action 7: Dana Perbaikan Irigasi Kabupaten  
(Kabupaten Irrigation Improvement Funds, KIIF)**

Direkomendasikan agar proyek ini berjalan seiring dengan proyek-proyek lain dalam pengembangan dana, seperti misalnya *KIIF*, dan membantu staf dalam penanganan dana-dana tersebut, dalam ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan M&E.

**Action 8: Peningkatan O&P dan Joint Management**

Saat P3A telah terbentuk dan bergerak menuju posisi di mana diharapkan akan bisa masuk ke perjanjian *joint management* dengan Pemerintah maka akan diperlukan bantuan yang berlanjut ke bantuan teknis. Ini akan diperlukan selama masa transisi yakni sampai tiba saat jaringan irigasi diserahkan pengelolaannya. Sesudah itu bantuan lebih lanjut yang dibutuhkan perlu dilakukan melalui kegiatan rutin dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Sebelum dan selama masa transisi itu diusulkan agar, di bawah kegiatan yang tercakup dalam proyek, petani menerima pelatihan dan dibantu dalam hal-hal yang menyangkut iuran pengelolaan air. Input utama dari kegiatan ini ialah bantuan teknis yang pertama-tama perlu dilakukan oleh Dinas Pemerintah terkait, misalnya dalam hal pengaturan pola tanam, penyusunan jadwal pengoperasian air dengan perhatian khusus pada distribusi selama periode-periode kekurangan air, dan pengaturan jadwal pemeliharaan jaringan irigasi.

Input penting lainnya ialah membantu P3A dalam membuat perjanjian *joint management* dengan mengidentifikasi dengan tepat tanggung-jawab masing-masing pihak, dan dalam penyusunan jadwal bagaimana secara bertahap P3A akan mengambil oper tanggung-jawab yang lebih besar.

**Action 9: Pengumpulan iuran pengelolaan irigasi dan bantuan Pemerintah**

Ini satu lagi isu di mana P3A akan berkepentingan, namun karena begitu pentingnya maka diidentifikasi sebagai kegiatan yang terpisah. Bantuan teknis akan diberikan untuk membantu petani dalam melakukan penelusuran jaringan irigasi, membuat perkiraan biaya O&P berdasarkan kebutuhan nyata, menetapkan iuran pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dilakukan dan golongan pemakai air, menentukan dalam bentuk apa pembayaran iuran harus dilakukan, cara pengumpulan iuran, melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka yang tak mau bayar, pemilik tanah absentee, pelanggar ketentuan, pembukuan keuangan, dan banyak lagi masalah lainnya.

**Action 10: Rehabilitasi jaringan irigasi**

Tampaknya banyak jaringan irigasi yang membutuhkan rehabilitasi di mana masalah yang terjadi di atas kemampuan perbaikan dalam pengertian pemeliharaan rutin. Kebijakan baru yang berlaku ialah bahwa pengelolaan suatu jaringan irigasi harus diserahkan dulu sebelum direhabilitasi. Maka salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk itu ialah bantuan teknis untuk membantu P3A dalam menyusun proposal rehabilitasi, mengidentifikasi sumber pendanaan/kontribusi dari petani setempat dan mengirimkan proposal kepada sumber dana.

Masukan penting yang ke dua ialah dana yang dibutuhkan untuk melengkapi kemampuan swadaya/kontribusi petani setempat untuk pelaksanaan rehabilitasi, supervisi pekerjaan konstruksi dan pengawasan mutu bangunan. Bila program *KIIF* sudah berjalan maka penggunaan dana untuk keperluan rehabilitasi seperti itu perlu disediakan.

**Action 11: Monitoring dan evaluasi**

Sementara kebanyakan kegiatan memerlukan sistim administrasi secara rinci dan sampai batas tertentu termasuk dampak dari kegiatan tersebut, direkomendasikan agar unit M&E dibentuk secara terpisah. Unit ini bertugas memeriksa akurasi dari pada sistim administrasi tersebut di atas, dan dalam beberapa hal juga meneliti dampak dari tiap kegiatan yang dilakukan. Unit M&E bertanggung-jawab untuk memeriksa semua kegiatan yang tercakup dalam *Action Plan* (Rencana Tindakan), mengidentifikasi di mana terdapat kelemahan-kelemahan, dan menyediakan informasi yang diperlukan proyek untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian berbagai kegiatan proyek yang sedang berjalan.

Direkomendasikan agar penekanan lebih diberikan pada prosedur-prosedur *monitoring* dan penetapan *ranking* P3A sebagaimana didiskusikan secara terperinci dalam laporan

(3) Rencana Tindakan di Sektor Pertanian

**Action 12: Rencana Tindakan di Sektor Pertanian**

Banyak masalah di sektor pertanian; dan dalam banyak hal situasinya sedang memburuk. Sementara masalah itu di luar konteks permasalahan pokok *Action Plan* dan sementara adalah juga mungkin untuk melaksanakan *Action Plan* tanpa perbaikan di sektor pertanian, kebutuhan akan perubahan tidak bisa dinyatakan lebih dari yang bisa diungkapkan. Kunci untuk mendapatkan kerja sama petani terhadap kebijakan baru dalam pengelolaan irigasi ialah bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang baik dari usaha tani beririgasi. Semakin baik penghasilan akan semakin mampu dan, mungkin, semakin mau mereka memberikan kontribusi untuk menanggung biaya penuh O&P.

Salah satu bidang di mana terdapat kaitan langsung antara pertanian dan Rencana Tindakan irigasi ialah pengembangan *agri-business* dan keterlibatan kemampuan P3A yang aktif. Sementara tak direkomendasikan sebagai kegiatan pokok, bila P3A telah menjadi layak, adalah sangat mungkin untuk membentuk koperasi dan bergerak di bidang peningkatan pendapatan.

### 4.3 Rencana Tindakan bagi Hubungan Masyarakat Irigasi dan Pertanian Irigasi

“Rencana tindakan tak langsung” yang ditunjukkan di bawah merupakan isi yang dimensinya benar-benar berbeda dari “Rencana tindakan inti secara langsung”, yang dilukiskan untuk meningkatkan penyerahan O&P irigasi. Pada kesempatan “rencana tindakan secara langsung” ini, beberapa tekanan perhatian perlu dipertimbangkan yaitu : 1) tidak melimpahkan banyak uang bantuan, 2) Bersedia untuk menggunakan sarana sosial yang ada, 3) menemukan karakter “menikmati hidup” pada masyarakat di negara ini, 4) mengembalikan “harga diri social” yang ditanamkan sejak zaman dahulu dalam psikologi masyarakat. 5) menurunkan intervensi “administrasi” yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, 6) menyediakan kesempatan untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kerja sama masyarakat, 7) pentingnya menanamkan sudut pandang dimana peraturan pembagian tugas dan usaha-usaha oleh individu untuk menjamin kehidupan mereka sendiri.

### 4.4 Rencana Tindakan dan Hasil-Hasil WATSAL

Selama periode Studi Fase I (April sampai Nopember 2000) dan Fase II (Januari 2001 sampai presentari akhir Oktober 2001) banyak perubahan telah terjadi. Ketentuan-ketentuan dirubah, peraturan-peraturan baru diundangkan, Terms have alter ed, new legislation has been enacted, struktur-struktur kelembagaan dibentuk dan dihapus, dan ide-ide dikonseptualisasikan, dicoba dan diuji. Sementara tiap upaya yang dilakukan untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan ini dalam study tak bisa berjalan terus karena awal Studi dan Fase II (draft laporan akhir) telah selesai dilakukan pada bulan Juni 2001.

Dengan keterbatasan-keterbatasan ini beberapa isu penting yang berkaitan tak sempat mendapat perhatian dari konsultan dan perlu dikaji secara paralel dengan Studi ini. Pertanian dan reformasi kebijakan pertanian adalah contoh dari isu-isu yang amat berpengaruh pada penghasilan petani penggarap dan kemampuan mereka untuk ikut serta baik dalam tanggung-jawab keuangan maupun keanggautaan dalam pengembangan kelompok.

Dalam cakupan Rencana Tindakan (Tindakan 7) konsep Kabupaten Irrigation Improvement Funds (KIIF) dan pemerintahan yang bersih merupakan aspek-aspek yang belum sempat diteliti dan dipelajari secara rinci dalam kegiatan Studi ini. Sementara konsep KIIF jelas-jelas perlu diuji-coba ada masalah yang perlu dihindari, kemampuan yang harus diuji, dan audit dan transparansi keuangan yang harus dilakukan. Misalnya, perlukah dana ini dioperasikan sebagai dana pinjaman, dana bergulir, atau contributory fund, dan bagaimana cara kerjanya. Sementara Studi ini bersifat pendukung terhadap konsep KIIF untuk tujuan percontohan, disadari bahwa apabila berjalan baik maka ekspansi ke daerah-daerah lain perlu mengambil manfaat dari pengalaman itu sesegera mungkin. Contributory funding merupakan sesuatu yang penting untuk keberhasilan pengelolaan dana ini, namun rincian yang pasti dari mekanisme ini belum bisa dirumuskan

Aspek-aspek Rencana ini dan yang lainnya saat ini amatlah dinamis, bentuk akhir dan keterpaduannya ke dalam Rencana Tindakan haruslah dilakukan dengan fleksibel mungkin guna memungkinkan perubahan dan penyesuaian berdasarkan pengalaman praktis begitu pengembangan program percontohan mulai dilakukan. Pada tahap ini yang bisa ditekankan ialah bahwa langkah-langkah perbaikan, kendala, dan konsep-konsep yang telah dikaji dan Rencana yang disajikan di sini adalah dalam lingkungan yang ada sekarang, yang oleh konsultan dipandang pas terhadap kondisi yang

berlaku, baik di lapangan maupun dalam struktur kerangka kerja perencanaan ini.

#### 4.5 Pelaksanaan Rencana Tindakan

Rencana tindakan harus dilaksanakan, pertama pada kabupaten percontohan sebagai paket program pelaksanaan rencana yang dianjurkan. Berdasarkan skema-skema percontohan ini, prosedur rinci dan petunjuk telah dibuat bagi pelaksanaan secara nasional

Program Nasional Pengelolaan Air akan dioperasikan dengan negara/institusi donor di bawah prakarsa IBRD. Untuk mengkoordinasikan aktivitas pelaksanaan kebijakan manajemen irigasi yang baru di Kabupaten percontohan, perlu dibentuk panitia koordinasi yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan lembaga lain seperti halnya keanggotaan *Steering Committee* untuk Studi JICA.

Rencana pelaksanaan yang diusulkan untuk Rencana Tindakan disajikan pada Tabel S.4 dengan menggunakan Rencana Operasi PCM, yang mengindikasikan output, kelompok sasaran, lembaga pelaksana, dan pembagian tanggung-jawab dari tiap tindakan.

### 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

(1) Bertentangan dengan maksud pemerintah untuk menyerahkan tanggung-jawab pengelolaan jumlah jaringan irigasi yang ditargetkan untuk O&P yang lebih baik bagi fasilitas-fasilitas prasarana, dengan menggunakan konsep “Full Cost Recovery”, pada kenyataannya sangatlah tidak menggembarakan. Adalah amat sulit untuk menemukan atau mengidentifikasi rencana-rencana yang berorientasi target. Petani yang menggarap pertanian beririgasi, yang merupakan objek studi ini, melakukan kegiatan-kegiatan diversifikasi peningkatan pendapatan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Akibatnya, ketergantungan mental dan ekonomi mereka pada pertanian beririgasi merosot dengan cepat. Dalam reformasi yang berjalan diharapkan struktur sosial yang stabil dapat diciptakan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pelayanan umum sesegera mungkin, dan Pemerintahan-pemerintahan Kabupaten dapat disusun berdasarkan kebijakan desentralisasi. Diakui bahwa beberapa sudut pandang yang inklusif dan terintegrasi yang didasarkan pada perencanaan jangka menengah dan jangka panjang harus sesuai dengan paradigma baru. Hal ini timbul terutama karena kurangnya kemampuan dan pengalaman dalam perencanaan daerah dan pencairan anggaran biaya.

(2) Apa yang diharapkan dari Pemerintah sekarang ini adalah kreativitas dan kemandirian, yang sangat tidak disukai di bawah pemerintahan sebelumnya, dan kemampuan untuk memastikan anggaran yang cukup untuk memelihara kelangsungan masyarakat setempat, yang diberikan dari Pemerintah pusat ke daerah.

(3) Pada umumnya petani yang menggarap pertanian beririgasi tidak pernah mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan rencana jaringan irigasi, kecuali untuk permasalahan pada tingkat blok tersier dan kuarter. Sehingga mereka punya “rasa memiliki” hanya pada lingkup lahan dan jaringan irigasi tersebut, dan tak demikian halnya untuk fasilitas utama irigasi seperti *intake* dan saluran primer/sekunder. Di masyarakat pedesaan jaringan irigasi tersier dan kuarter telah dipelihara dengan baik oleh petani setempat sebagai salah satu kegiatan masyarakat pedesaan. Untuk memperluas dan

meningkatkan penyerahan O&P irigasi kepada P3A, sambil menetapkan target-target untuk memungkinkan petani bertanggung-jawab atas O&P untuk fasilitas-fasilitas jaringan utama, adalah amat penting untuk pertama-tama mempercepat pembentukan unit-unit P3A dari kelompok-kelompok tradisional masyarakat pedesaan dengan menyadarkan mereka akan “Full Cost Recovery Concept”, dan membimbing mereka untuk memahami pentingnya O&P jaringan irigasi utama di daerah hulu.

(4) Adalah merupakan keadaan yang tidak lazim jika petani di daerah hilir sering melanggar pembagian air yang berlaku untuk menyatakan ketidak-puasan terhadap daerah hulu. Hal itu terjadi justru karena mereka menarik diri. Pemerintah juga tidak secara agresif melibatkan masalah O&P irigasi sebagai masalah petani pribadi. Tim studi JICA telah menguji isi Rencana Tindakan berdasarkan pengertian akan pentingnya untuk menggunakan “Prosedur Pengambilan Keputusan secara Partisipatif” (RRA, PRA dan prosedur analisa masalah dari PCM), yang dilaksanakan dalam studi JICA agar petani mengakui manfaat fasilitas irigasi sebagai aset nasional.

(5) "Bhineka tunggal ika" digunakan sebagai motto dalam mengurus negeri sejak Kemerdekaan sampai sekarang dan sungguh berhasil. Sementara dianjurkan untuk memperhatikan “keaneka-ragaman budaya setempat” saat memulai Studi ini, diakui bahwa keaneka-ragaman itu tidaklah terlalu mempengaruhi perbedaan-perbedaan O&P irigasi menurut kultur setempat. Sebenarnya “jaringan irigasi” bisa dipahami sebagai suatu bentuk implementasi untuk mempersatukan sumberdaya air, kondisi lahan dan pengelolaan air yang berbeda-beda tempat demi tempat. Sementara pengujian terhadap cara-cara pengenalan agar gagasan “Full Cost Recovery” bisa diterima menjadi subyek pokok Studi, sasaran gagasan tersebut ialah fasilitas-fasilitas jaringan utama di bagian hulu yakni mulai dari saluran sekunder, yang memerlukan penanganan terutama oleh tingkat Gabungan P3A, bukan oleh unit P3A. Seperti halnya untuk isu pembentukan unit-unit P3A, diakui bahwa keaneka-ragaman budaya tidaklah terlalu merupakan faktor yang menentukan dibandingkan dengan isu tentang apakah anggota berminat untuk membentuk P3A ataukah tidak, atau isu apakah orang yang potensial untuk menjadi pengurus ada ataukah tidak yang memimpin komunitas setempat ke suatu tujuan.

(6) Menjadi lebih jelas bahwa hubungan-hubungan “ketidak-percayaan” yang serius terjadi antara petani dan pemerintah, sebagai latar-belakang rendahnya pencapaian kegiatan penyerahan O&P irigasi. Petani tidak mempunyai rasa memiliki fasilitas jaringan irigasi yang dibangun pemerintah pada masanya. Ketidak-percayaan internal juga terjadi di antara strata dan sector di pihak pemerintah. Perundang-undangan dan peraturan efektif karena adanya “kepercayaan”. Penyusunan Action Plan dalam Studi ini dilakukan dari sudut pandang dan kepentingan untuk “membangun rasa memiliki” dan “mengembangkan kemitraan”, berdasarkan atas usaha untuk membangkitkan “kepercayaan dalam masyarakat”.

(7) Hanya pihak pemerintah yang melakukan pemeliharaan terhadap sebagian besar jaringan-jaringan irigasi dan kegiatan O&P mereka bisa dikatakan seperti “governments’ one-man show”. Sebagai bagian dari alasan dan latar-belakang lemahnya rasa memiliki dari pihak petani dan jarangnyanya kemitraan di lapangan, sejarah dan prosedur ada di sana. Action Plan yang diuraikan dalam Laporan ini mengarah pada masalah pemerintah daerah dan titik awal bagi petani untuk memulai dengan segera oleh petani serta pembuatan rencana untuk menjembatani pencapaian tujuan masa depan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam WATSAL. Tim Studi memahami bahwa pemerintah tak bisa menunggu sampai semua yang diperlukan siap melainkan harus memulai kegiatan apapun yang sudah bisa

dilakukan, menggerakkan sumber-sumber yang ada, terutama tenaga-tenaga staf pemerintah daerah yang ada, mulai dari subyek-subyek yang dihadapi para petani dan tenaga staf pemerintah setempat. Khususnya target-target pembentukan unit-unit P3A dan pelaksanaan kegiatan yang siap untuk segera dimulai, dan masalah-masalah untuk melakukan seperti itu. Demikian juga mengenai “Coordination WUA support groups” yang diperlukan di tingkat Kabupaten dapat dibentuk sekarang dengan menggunakan perundang-undangan dan peraturan yang sudah ada.

(8) Penumbuhan kemauan untuk membentuk Gabungan P3A akan terjadi melalui peningkatan kemampuan dalam merumuskan masalah dan manajemen mereka sendiri. Namun apa yang bisa ditunjukkan oleh pemerintah dengan banyak “kisah sukses” tentulah merupakan salah satu kunci yang penting, yang akan bisa mengubah “ketidak-percayaan” petani kepada pemerintah. Akan menjadi amat penting bagi pemerintah untuk melipat-gandakan upaya untuk berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah-masalah bersama petani dan sumber-sumber lainnya seperti LSM, sebagaimana yang dilakukan proyek IDTO dengan “kisah-kisah sukses” mereka.

## 5.2. Rekomendasi

### (1) Rencana Tindakan dan WATSAL

Rencana Tindakan dari Studi ini, dengan isu penyerahan tanggung-jawab O&P jaringan irigasi sebagai subyek utama, teruji sejalan dengan WATSAL di mana Pemerintah berupaya menyediakan kerangka kebijakan pembangunan dan pengusahaan sumberdaya air, dan menyelenggarakannya dengan sudut pandang petani dan staf pemerintah daerah yang terkait dengan pertanian beririgasi. Sekalipun perumusan mengenai rincian kebijakan desentralisasi belum selesai, Rencana Tindakan itu tetap disusun dengan materi yang hendaknya dimengerti dalam konteks sistem pemerintahan yang ada. Pemerintah perlu memusatkan perhatian untuk menetapkan cara-cara pelaksanaan Rencana Tindakan pada tahap awal, dengan mendorong pemerintah daerah yang akan menjadi pusat-pusat administrasi pemerintahan daerah dalam waktu tak lama lagi, berdasarkan pengakuan kembali akan pentingnya subyek-subyek dari Studi ini.

WATSAL merupakan struktur penyesuaian pinjaman, yang mempengaruhi manajemen sumber daya air dan merupakan kerangka kebijakan yang dibutuhkan untuk Indonesia, yang berusaha merealisasikan reformasi desentralisasi sekarang. Itu merupakan kerangka dari berbagai kebijakan dan upaya-upaya, tapi sebagaimana dikatakan, kajian-kajian dan upaya lebih jauh perlu dilakukan untuk untuk membuat lebih kongkrit perincian-perinciannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada untuk pelaksanaannya di lapangan. Terutama, dalam pelaksanaan desentralisasi yang baru saja dimulai saat ini, penyesuaian-penyesuaian di antara pemerintahan propinsi dan kabupaten mengenai isu-isu alokasi biaya pembangunan dan pengoperasian sungai-sungai dan sumberdaya air dan interpretasi hak guna air dan seterusnya, di mana penyusunan mengenai sistem yang kongkrit belum selesai dilakukan. Pemerintah perlu, dalam hubungannya dengan Rencana Tindakan yang menjadi satu dengan laporan ini, menyelesaikan kajian-kajian secara kongkrit mengenai subyek-subyek yang masih tersisa di dalam format WATSAL sesegera mungkin, dengan segenap tenaga.

### (2) Pertanian Beririgasi

Pertanian di Indonesia tampak tertinggal dengan organisasi-organisasi administrasi yang kompleks

dari berbagai Departemen dan Instansi, meskipun dalam reformasi pemerintahan sekarang ini. Kondisi-kondisi administratif masih memberikan kemungkinan untuk membuat rumitnya alokasi tugas dan tanggung-jawab mengenai isu-isu pertanian beririgasi. Situasi petani dan staf pemerintah sekarang ini tampak tertinggal dari laju kegiatan non-politik karena Pemerintah tidak membuat kebijakan negara dengan tegas di bidang pertanian, terutama pertanian beririgasi dewasa ini. Karena itu Pemerintah perlu mencoba menciptakan situasi yang bisa menggambarkan suatu rencana untuk kurun waktu tertentu yang bisa digunakan petani untuk membuat perkiraan dan rencana yang kongkrit, yang melakukan produksi pangan nasional, dengan membuat kebijakan nasional pertanian yang bisa digunakan untuk latar-belakang penyerahan O&P irigasi yang menjadi subyek Studi ini. Terutama reformasi dan perbaikan produksi bahan-bahan kimiawi untuk pertanian dan pupuk, sistim distribusinya dan lain-lain, juga mengenai sistim kredit untuk petani yang tidak berjalan dan sistim KUD yang tak dipercaya petani, adalah isu-isu yang perlu mendapat perhatian mendesak.

### (3) Operasi Database WUA

Guna meningkatkan penyerahan O&P irigasi, penetapan tujuan yang kongkrit sangat penting di mana P3A perlu dibentuk untuk tahap berikutnya, sambil mencoba memahami kendala-kendala yang dihadapi petani. Database P3A yang disusun dalam Studi ini terdiri dari item-item umum mengenai organisasi P3A, kegiatan P3A, dan kondisi usaha tani, manajemen O&P, nama daerah irigasi yang bersangkutan dan jaringan irigasi di tingkat tersier. Hasilnya bisa merupakan prototipe “inventarisasi P3A” yang diusulkan sebagai salah satu Rencana Tindakan, dan itu bisa diadaptasi untuk propinsi-propinsi dan kabupaten sebagaimana mestinya. Termasuk penyusunan infrastruktur Teknologi Informasi yang diperlukan Pemerintah perlu melakukan upaya untuk menyediakan inventarisasi P3A sebagai persiapan dasar bagi penyerahan O&P irigasi, yang bisa tersebar dengan cepat ke se seluruh negeri. Struktur, materi dan pengoperasian database telah selesai dilakukan dan dikompilasi ke dalam CD-Rom dan diserahkan kepada pemerintah propinsi dan kabupaten yang bersangkutan dalam Fase-2 Studi ini.

### (4) Masalah-masalah lain

Banyak kendala terjadi pada latar-belakang dari subyek-subyek Studi ini. Di antaranya kondisi kemiskinan petani, terutama yang disebabkan oleh sistim penguasaan tanah secara tradisional, berpengaruh secara mendalam. Adalah jelas bahwa petani tak bisa meningkatkan produktifitas lahannya, kemungkinan untuk memberikan insentif bagi petani terbatas, dan kemampuan ekonomi petani untuk memenuhi kewajiban membayar iuran air tak akan bisa ditingkatkan, bila tak ada perbaikan luas lahan yang sempit dan sistim bagi hasil yang berlaku sekarang. Juga lingkungan masyarakat di sekitar pertanian beririgasi memberikan pengaruh dengan menerima kenyataan akan pertanian lahan sempit dengan pemusatan tenaga secara tradisional yang membatasi petani. Pemerintah perlu mulai berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengakhiri sistim penguasaan lahan secara tradisional sejalan dengan pelaksanaan proyek ini.

Telah diketahui umum, bahwa tak hanya petani tetapi juga staf pemerintah, telah dikendalikan oleh roh di mana mereka tak bisa lagi mengakui dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial mereka selain memusatkan pikiran bagi kepentingan sendiri demi kelangsungan hidup mereka, sebagai falsafah hidup. Beberapa kemungkinan masih akan tetap terjadi dan akan membuat keliru pelaksanaan Rencana Tindakan sebagai pemberian insentif belaka, tanpa menanyakan kewajibannya. Itulah sebabnya Pemerintah perlu memegang teguh keyakinan untuk mendapatkan kembali “social trust” di

kalangan masyarakat, untuk mengarahkan usaha mereka dalam membantu diri mereka sendiri dan semangat bertanding dalam menunaikan kembali kewajiban-kewajiban sosial mereka, saat Pemerintah akan melaksanakan Rencana Tindakan.

Pemerintah memanfaatkan pinjaman-pinjaman dan hibah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga donor internasional sampai jumlah yang lebih dari yang dibutuhkan untuk proyek-proyek pembangunan nasional yang telah dilaksanakan sesudah kemerdekaan. Pemerintah perlu bertujuan untuk menghindarkan diri dari jerat hutang dan perlu segera sadar akan mekanisme yang memungkinkan untuk mengelola pemerintahan berdasarkan kesadaran finansial.

Sesudah bebas dari cengkeraman pemegang kekuasaan negara selama lebih dari 400 tahun termasuk setengah abad semenjak kemerdekaan barulah sekarang ini bagi rakyat Indonesia untuk mulai. Banyak masalah di sana bagi masyarakat untuk memberikan sumbangannya bagi aset nasional dengan aturan main yang adil. Namun jika masyarakat tidak mau dan tidak mampu ikut memikul beban atas jalan keluar, maka gunung masalah akan menjadi lebih besar katimbang yang sekarang. Pemerintah perlu terus berupaya untuk menciptakan kembali iklim “kepercayaan”, yang akan menjadi landasan bagi kegiatan masyarakat, sambil berusaha mengembangkan kemampuan memahami situasi dewasa ini untuk keperluan “pelayanan umum” sebagai asumsi dasar dalam pemecahan akumulasi masalah.

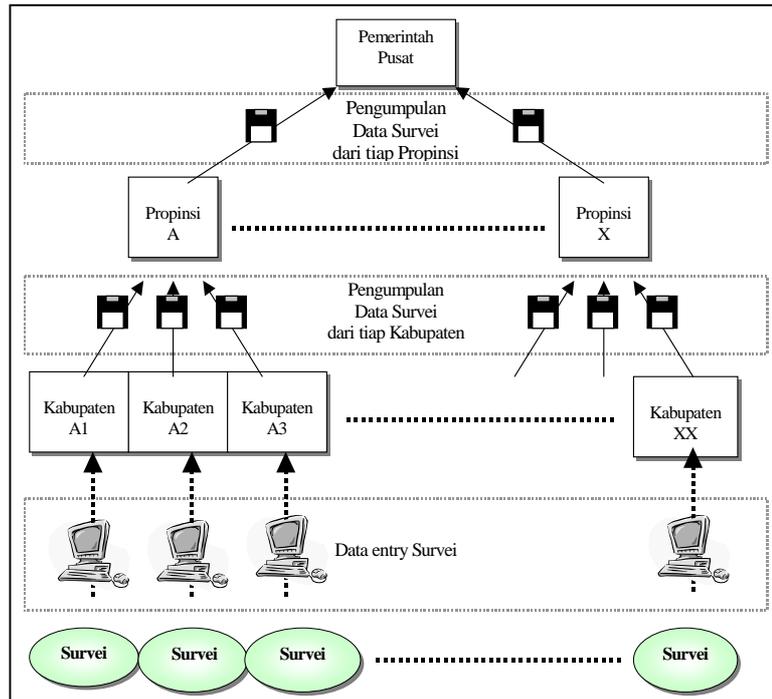
Tabel S.1 Rincian Kegiatan Studi

Tahap	No.	Kegiatan
Fase I	Persiapan	【 1 】 Pengumpulan dan analisa data/informasi mengenai Studi
		【 2 】 Penyusunan proses dan rencana pelaksanaan Studi
		【 3 】 Penyusunan Inception Report
		【 4 】 Penjelasan dan diskusi Inception Report di Jepang
	Survei Lapangan (1)	【 5 】 Penjelasan dan diskusi mengenai Inception Report
		【 6 】 Persiapan Survei Lapangan (1)
		【 7 】 Pengumpulan dan analisa data/informasi pendukung
		【 8 】 Analisis aspek-aspek keorganisasian dan kelembagaan
		【 9 】 Analisis aspek-aspek bangunan fisik dan sosial
		【 10 】 Analisis aspek-aspek operasional
		【 11 】 Survei P3A dari tinjauan sosiologis masyarakat di perdesaan
		【 12 】 Survei P3A dengan Kuisisioner
		【 13 】 Kategorisasi kendala dan masalah
		【 14 】 Seleksi lokasi untuk survei mendetail mengenai P3A
		【 15 】 Rancangan data-base
		【 16 】 Penyusunan Progress Report I
		【 17 】 Penjelasan dan diskusi Progress Report I
	Kerja di Jepang (1)	【 18 】 Pelaporan hasil-hasil Survei Lapangan (1)
		【 19 】 Penyusunan Interim Report
		【 20 】 Persiapan Survei Lapangan (2)
Fase II	Survei Lapangan (2)	【 21 】 Penjelasan dan diskusi tentang Interim Report
		【 22 】 Merumuskan hipotesis langkah pemecahan kendala/masalah yang telah dikategorisasikan.
		【 23 】 Survei mendetail mengenai P3A
		【 24 】 Studi kasus P3A
		【 25 】 Mengidentifikasi faktor-faktor penting dan menganalisa kendala dan masalahnya
		【 26 】 Konfirmasi masalah-masalah dengan pendekatan partisipatif (pemeriksaan terhadap masalah-masalah penting)
		【 27 】 Penyusunan Rencana O&P dengan methoda dari bawah (identifikasi langkah pemecahan)
		【 28 】 Pengujian terhadap alternatif-alternatif pemecahan
		【 29 】 Penyusunan Action Plan untuk mempercepat program penyerahan irigasi
		【 30 】 Penyusunan Progress Report II
		【 31 】 Penjelasan dan Diskusi mengenai Progress Report II
	Kerja di Jepang (2)	【 32 】 Pelaporan hasil-hasil Survei Lapangan (2)
		【 33 】 Penyusunan draft Laporan Akhir
		【 34 】 Persiapan Seminar
	Survei Lapangan (3)	【 35 】 Penjelasan dan diskusi draft Laporan Akhir
		【 36 】 Penyelenggaraan Seminar mengenai hasil Studi
	Kerja di Jepang (3)	【 37 】 Penyusunan Laporan Akhir

Table S.2 Perencanaan Operasi Rencana Tindakan

No.	Aktivitas	Hasil yang diharapkan	Sasaran/keuntungan	Pihak terkait	Pelaksana	Jadwal Pelaksanaan											Keterangan				
						Startline	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah di pemerintah	1. Staf pemerintah regional dapat membentuk rencana tindakan mereka sendiri dan penarikan yang dibutuhkan, koordinator bagi penyerahan manajemen irigasi 2. Staf pemerintah menerima pelayanan masyarakat	Df pemerintah pusat dan regional	Pusat: Keresowil Projeksi: BAPPEDA, Pengasin, Puteban Kab: BAPPEDA, Pengasin, Puteban	PMU: Keresowil Abitas lapangan: PTOA	Penyelesaian WATSAL															
2	Inventarisasi pembenahan dan pemeliharaan	1. Mengidentifikasi kondisi rencana irigasi/PSA saat ini bagi pengawas untuk membuat kebijakan dan aset manajemen nasional	Sensus rencana irigasi dan PSA termasuk Federasi PSA dan MUSA	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil Projeksi: Dinas Pengasin	PMU: Keresowil dan tingkat pusat Abitas lapangan: Keresowil lokal dan supervisor irigasi dan PPL	Secukupnya															10: Inventarisasi rencana skala besar & kecil 2: Database aset nasional 4: Inventarisasi PSA 5: Penetapan sistem irigasi 6: Penetapan proposal rencana rehabilitasi irigasi
3	Kesadaran masyarakat dan kapasitas pembangunan pada tingkat PSA	Petani dapat menyadari kebijakan pemerintah terhadap program penyerahan irigasi pada tingkat lapangan	Sensus PSA/petani	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil Projeksi: Dinas Pengasin, PTOA Kab: Dinas Pengasin & C/Os	Kab: Dinas Pengasin, Forum pendukung koordinasi PSA dan C/Os Petani	Penyelesaian WATSAL															
4	Partisipasi pemimpin PSA	Kemampuan untuk menilai jejak PSA untuk mengorganisir partisipasi rencana tindakan partisipasi dan pelaksanaan lokal dengan PSA masing-masing bagi irigasi pertanian berkelanjutan	Sensus PSA/petani	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil Projeksi & Kab.: Dinas Pengasin & Forum pendukung koordinasi PSA	Kab: Dinas Pengasin, Forum pendukung koordinasi PSA dan C/Os Petani	Penyelesaian WATSAL															
5	Identifikasi kebutuhan	Untuk memproduksi kondisi keseimbangan pengalangan yang lebih baik pada tingkat lapangan. Untuk memperbaiki kecapaian dan organisasi PSA	Sensus PSA/petani yang berfokus berfokus	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil dan Bangsal of MOHA Projeksi & Kab.: Dinas Pengasin & Forum pendukung koordinasi PSA	Kab: Dinas Pengasin, Forum pendukung koordinasi PSA dan C/Os Petani	Penyelesaian WATSAL															
6	Pembentukan infrastruktur PSA dan Federasi PSA	Pelaksanaan PSA secara demokratis untuk mengontrol komponen dasar penyerahan manajemen irigasi	Sensus PSA/petani yang berfokus berfokus secara efektif	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil Projeksi & Kab.: Dinas Pengasin & Forum pendukung koordinasi PSA	Kab: Dinas Pengasin, Forum pendukung koordinasi PSA dan C/Os Petani	Penyelesaian WATSAL															
7	Bantuan pembenahan irigasi kabupaten	Sistem operasi irigasi yang efisien di bawah biaya bantuan maksimum yang tersedia di pemerintahan kabupaten	Sensus penalti lahan rencana irigasi termasuk pemerintah	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil dan Bangsal of MOHA Projeksi & Kab.: Dinas Pengasin & Forum pendukung koordinasi PSA	Kab: Dinas Pengasin, Forum pendukung koordinasi PSA dan Keresowil PSA dan petani	Penyelesaian WATSAL															
8	Perbaikan O&P serta manajemen gabungan	Jumlah maksimum PSA lapangan di bawah kontrol antara PSA/petani dan pemerintah	Sensus penalti lahan rencana irigasi termasuk pemerintah	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil dan BAPPENAS Projeksi & Kab.: Dinas Pengasin & Forum pendukung koordinasi PSA	Kab: Dinas Pengasin, PSA dan petani	Penyelesaian WATSAL															
9	DfM persetujuan dan dukungan pemerintah	Untuk melaksanakan jumlah PSA yang cukup dalam mempersiapkan biaya O&P yang realistis, dari pengumpulan dana persakat ut, dan membayar biayanya secara efisien. Hasil jengam tersebut seharusnya mengurangi subsidi pemerintah dan nilai perbaikan irigasi	Sensus penalti lahan rencana irigasi termasuk pemerintah	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil dan Bangsal of MOHA Projeksi & Kab.: Dinas Pengasin & Forum pendukung koordinasi PSA	Kab: Dinas Pengasin, PSA dan petani	Penyelesaian WATSAL															
10	Rehabilitasi sistem irigasi	Areal irigasi membawa kembali kondisi kerja yang baik untuk memaksimalkan pengembalian investasi dalam rehabilitasi	Sensus petani dan PSA di bawah rencana irigasi yang sudah rusak saat ini	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil dan BAPPENAS Projeksi & Kab.: Dinas Pengasin and Forum pendukung koordinasi PSA	Kab: Dinas Pengasin, PSA dan petani dan kontraktor	Penyelesaian WATSAL															
11	Pengawasan dan evaluasi	Pengawasan dan evaluasi kemajuan Rencana Tindakan dan penyerahan manajemen irigasi dan menyediakan tolak ukur yang sesuai jika mereka membutuhkan	Sensus penalti lahan rencana irigasi termasuk pemerintah	Pusat: DWRM of DWR, Keresowil and BAPPENAS Projeksi & Kab.: BAPPEDA & Dinas Pengasin	PMU: Keresowil, Keresowil dan BAPPENAS Projeksi & Kab.: Keresowil & BAPPEDA	Penyelesaian WATSAL															
12	Agriculture enhancement plan	Farmers' confidence and their own initiative could be the most important requirements for the success of any farmer activities on a sustainable basis. Then agricultural income increase.	Petani	Pusat: Center of Agricultural Extension, MOA Projeksi & Kab.: BAPPEDA & Dinas Pertanian	Pembentukan sistem perikanan oleh Keresowil dan tingkat pusat Penyerahan perikanan oleh PPL dan petani	Secukupnya															

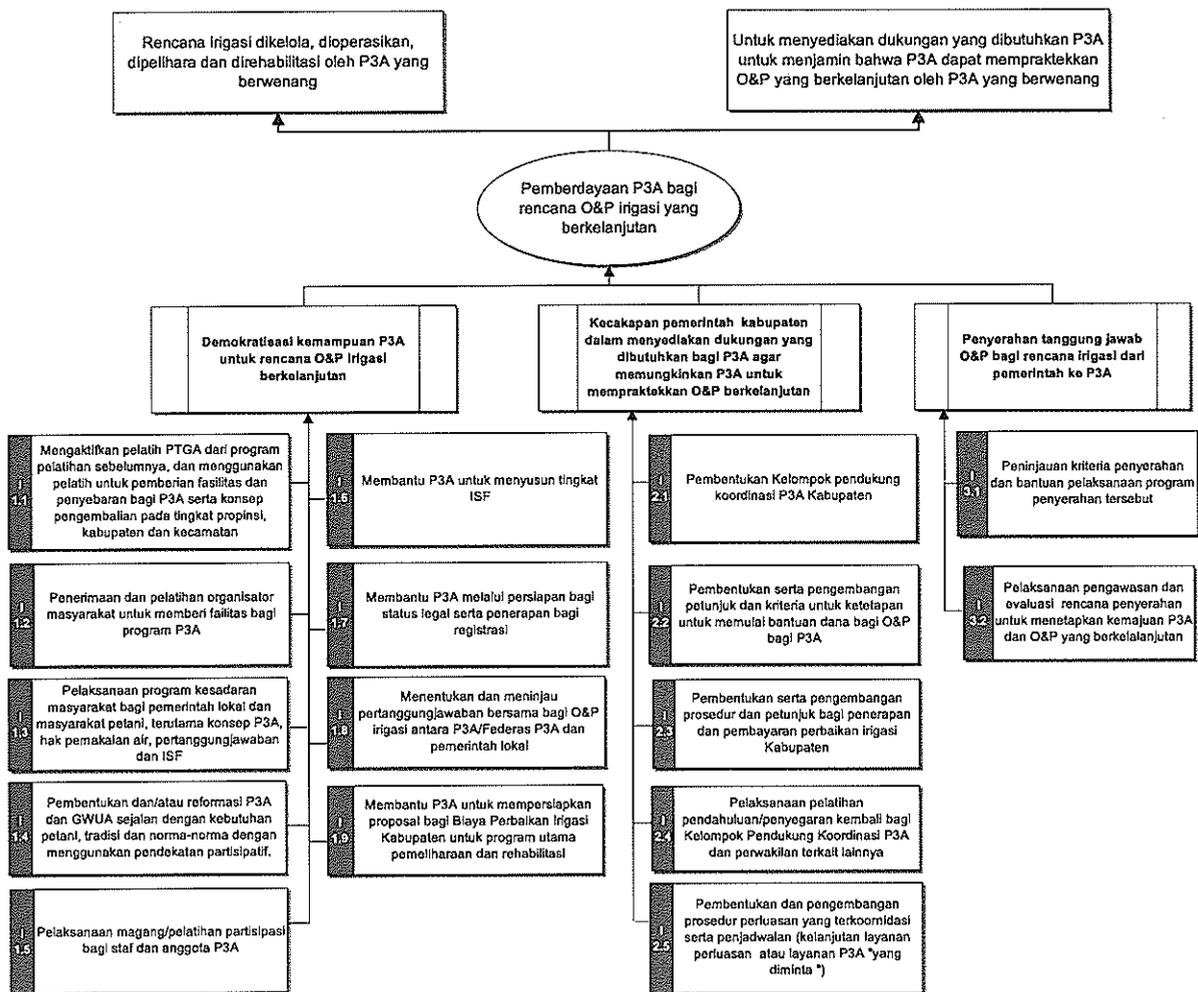
Legenda:  
 Pelaksanaan sistem di kabupaten  
 Tingkat persiapan  
 Pelaksanaan di semua provinsi di Indonesia



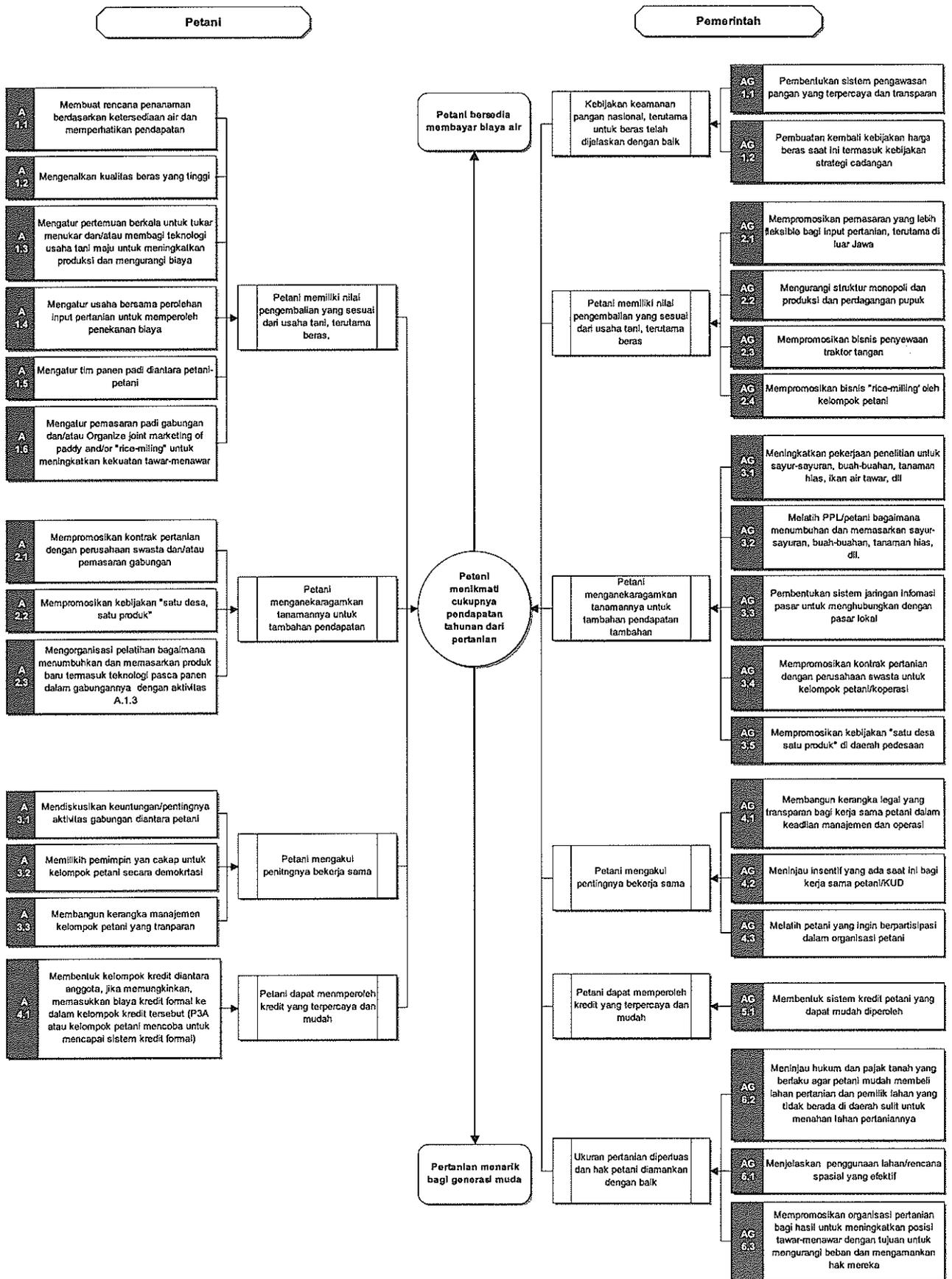
Gambar. S.1 Alur persiapan dan pengumpulan data

Tabel S.3 Menu Data Dari P3A Database

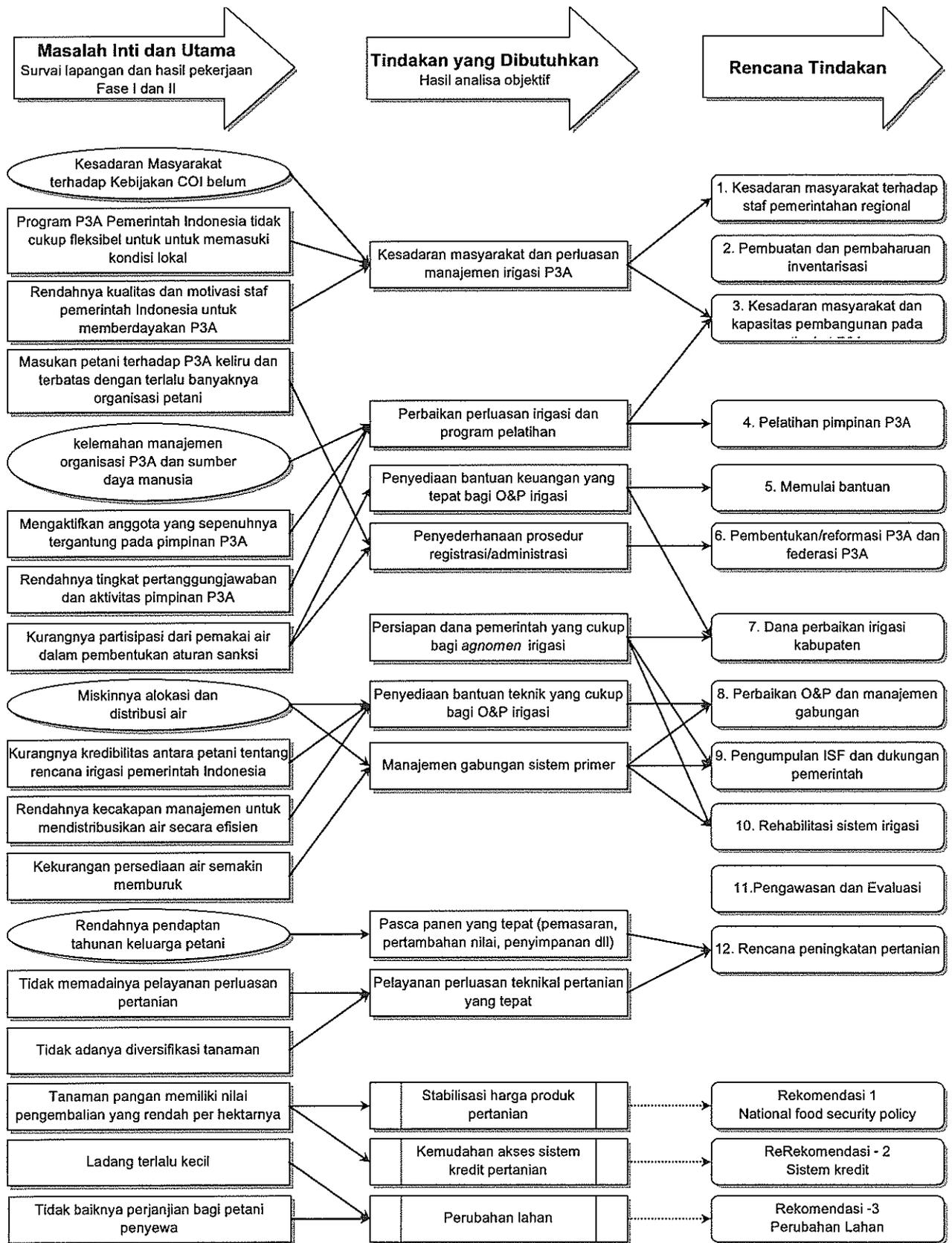
Kategori	Item
Informasi umum P3A	1) P3A_Status
	2) P3A_Gabungan
	3) P3A_Gabungan_Anggota
Sistim Irigasi	1) Jaringan irigasi
	2) Sistim irigasi/drainase tertier
ISF	1) P3A_ISF
Pengelolaan dan bimbingan untuk pemberdayaan P3A	1) P3A_Pelatihan
	2) P3A_Evaluasi
Pengelolaan Irigasi	1) P3A_Identifikasi
	2) P3A_Sejarah
	3) P3A_Lahan
	4) P3A_Kelembagaan_Struktur
	5) P3A_Organisasi
	6) P3A_Iuran
	7) P3A_Fungsi_Air_Distribusi
	8) P3A_Pemeliharaan_pelaksanaan
	9) P3A_Kegiatan_Rapat
	10) P3A_Sanksi
	11) P3A_Unit_Produksi
	12) P3A_Manajemen_Administrasi
	13) Peran Pemerintah
Pertanian tanaman pangan di lahan sawah	1) P3A_Teknis_Aspek
	2) P3A_Hama_Penyakit
	3) P3A_Biaya_Produksi
Kegiatan pertanian tanaman	1) P3A_Pertanian_Kegiatan
Kegiatan pertanian - Perennial crops (Tanaman buah-buahan)	1) P3A_Tanaman buah-buahan jenis
	2) P3A_Pertanian bisnis
	3) P3A_Jenis_Panen
Kegiatan pertanian - Peternakan	1) P3A_Peternakan
	2) P3A_Pengelolaan jenis ternak
	3) P3A_Ternak Makanan
	4) P3A_Biaya_Nilai_Ternak_Kegiatan
Pengelolaan dan konservasi air	1) P3A_Air manajemen
Aspek kelembagaan dan persepsi	1) P3A_Kelembagaan aspek
Penghasilan dari luar usaha tani	1) P3A_Sumber di luar usaha tani hasil



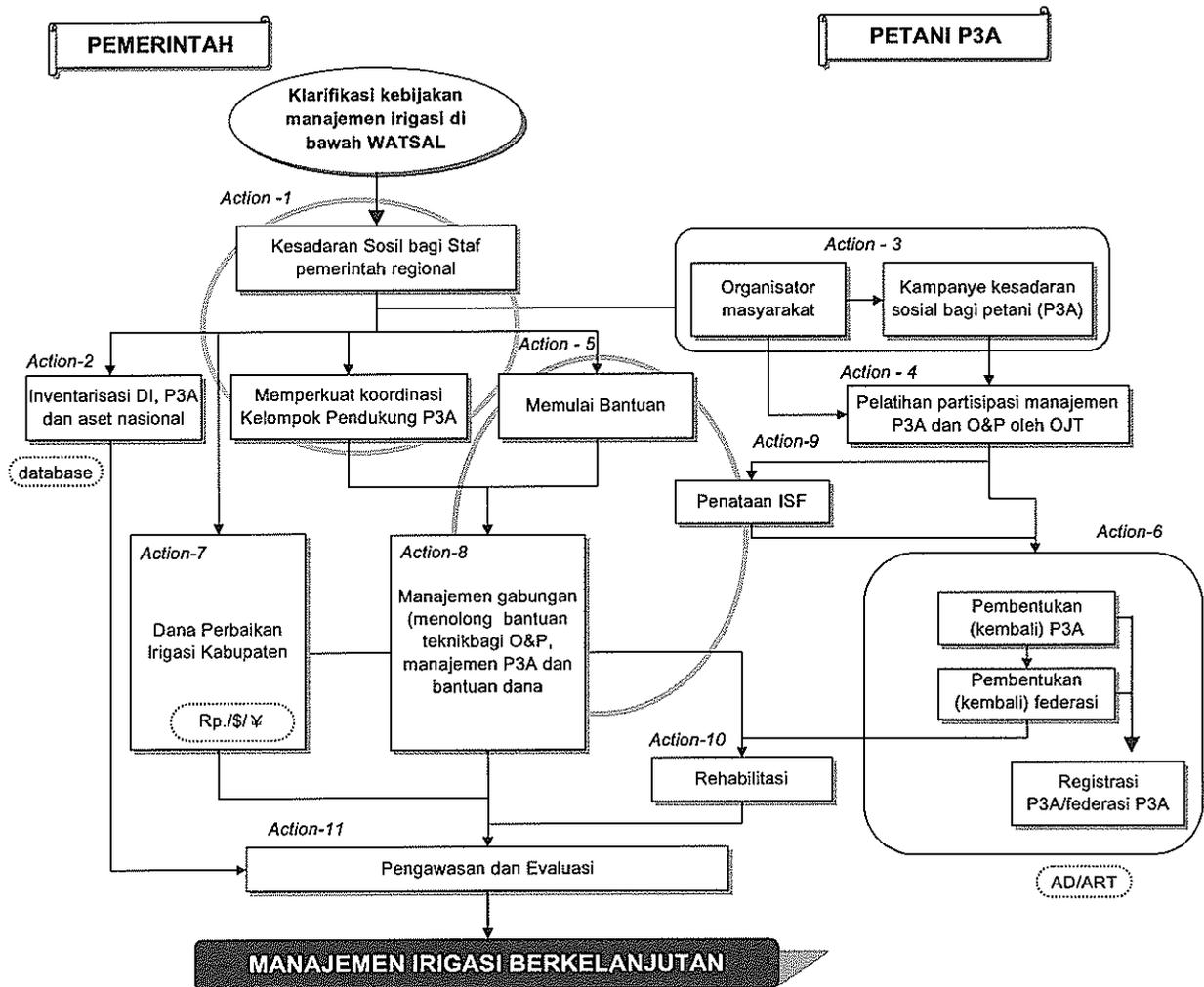
Gambar S.3 PDM atau Manajemen Irigasi dan P3A



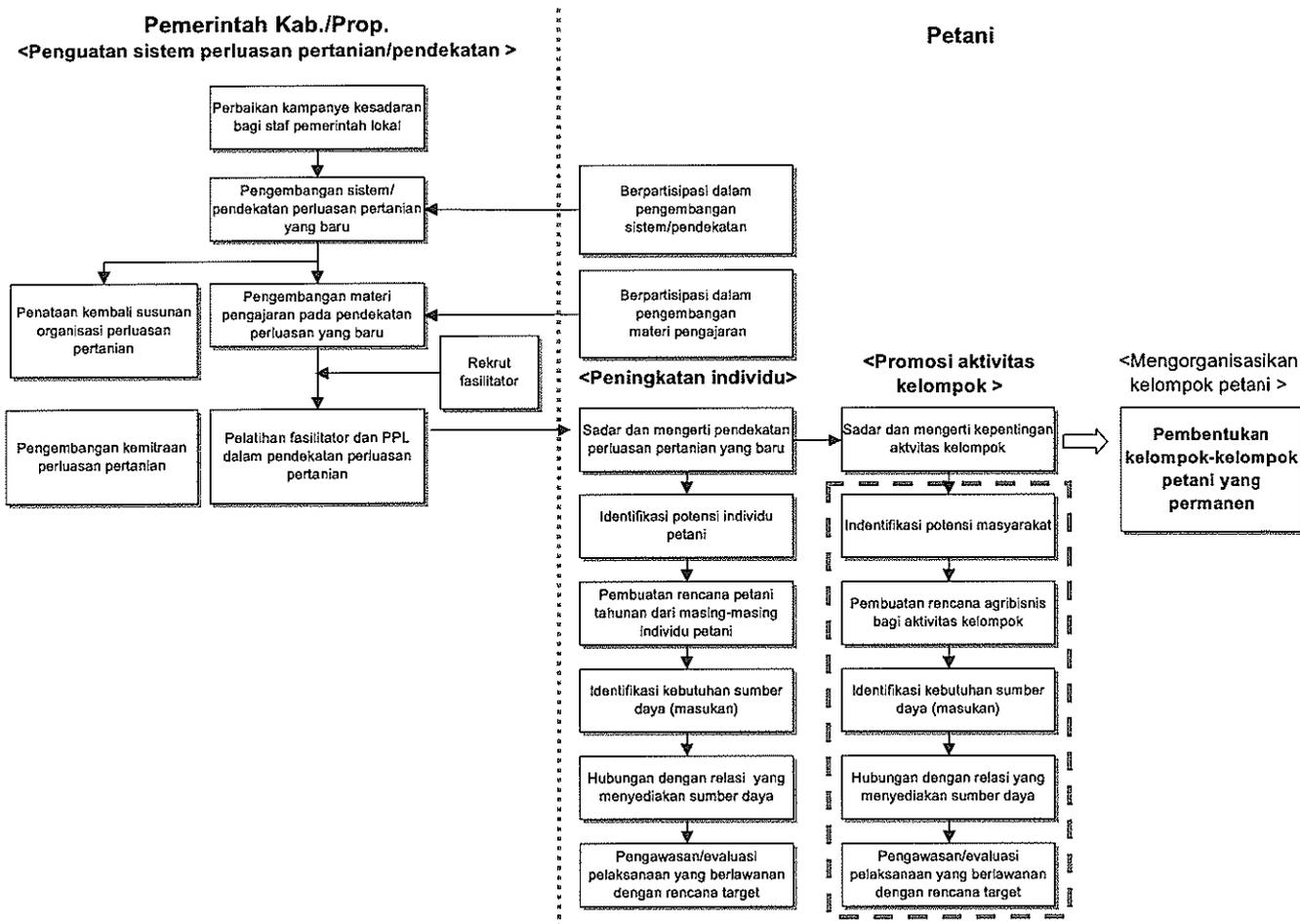
Gambar S.4 PDM Pertanian Irigasi



Gambar S.5 Masalah Utama, Tolak Ukur dan Rencana Tindakan



Gambar S.6 Rencana Tindakan bagi Manajemen Irigasi dan P3A



Gambar S.7 Garis besar Rencana Peningkatan Pertanian

Tabel SA.1 Kesadaran Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah diantara Staf Pemerintah

(1) Aktivitas No. :	Nama	Inisiatif-berkaitan dengan Perubahan Prilaku Pemerintah Indonesia	Kategori Program
(2) Sektor :	Ingasi	(3) Perkiraan Periode Pelaksanaan :	6 bulan
(4) Wilayah Target / Kategori	1) Perkiraan Jumlah Total ;	2) Perkiraan Wilayah Total ;	5 propinsi studi P3A JICA
3) Lainnya, Indonesia, Propinsi Sumatera Barat dan 7 kabupaten serta kotamadya yang tercakup dalam studi ini			
<b>(5) Deskripsi Program</b>			
Melaksanakan program partisipasi membutuhkan bantuan, rancangan program dan pelaksanaan untuk membantu Propinsi serta kabupaten/kotamadya dan ingasi yang berkaitan dengan perwakilan Pemerintah Indonesia telah siap untuk melaksanakan program persiapan sosial dan untuk memberi fasilitas pelaksanaan program reformasi kebijakan ingasi, terutama perbaikan manajemen ingasi, pemberdayaan P3A dan program pemindahan. Aktivitas ini perlu ditujukan untuk sistem administrasi pemerintah Indonesia secara komprehensif dan perubahan perilaku staf pemerintah Indonesia, karenanya dapat mencakup instruksi pemerintah Indonesia dan kapasitas pembangunan pada propinsi dan pada tingkat kabupaten/kotamadya tertentu.			
<b>(6) Persepsi/identifikasi pelaksana, peraturannya, kondisi saat ini &amp; kekuatan yang dibutuhkan</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Tingkat Lapsang</u> : Pengamat/Ranling Pengairan , Kecamatan , dan Desa pemerintah Indonesia (Inisiatif, Kesuntungan, partisipasi)</li> <li>2) <u>Pemerintah Kabupaten</u> : Kabupaten pemerintah Indonesia, Bappeda, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian Inisiatif, Keputusan, tindakan, pembiayaan, keuntungan )</li> <li>3) <u>Pemerintah Propinsi</u> : a. Propinsi pemerintah Indonesia, Bappeda, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian (Dembayaan, Kontrol, MSE) b. PTGA (Tindakan, partisipasi, keuntungan) c. Perusahaan konsultan , Universitas, LSM (bantuan teknik)</li> <li>4) <u>Pemerintah pusat</u></li> </ol>			
<b>(7) Latar Belakang Program</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Pemecahan masalah saat ini yang dituju oleh Program</u> : a). Tidak sesuainya sistem sektoral dan intersektoral administrasi pemerintah Indonesia , b). Tidak sesuainya kapasitas kantor pemerintah Indonesia dan manajemen lapangannya , c). Pentingnya penempatan staf pemerintah Indonesia serta orientasinya (top-down, ego-sektoral, target-oriented, project-oriented)</li> <li>2) <u>Tidak urut yang telah diambil</u> : a). Pemecahan Perda Kab/Kotamadya berkaitan dengan hukum dan peraturan otonomi daerah , b). Reorganisasi struktur kab/kotamadya pemerintah Indonesia dan mekanisme kerjanya , c). Sosialisasi yang terbayas dari reformasi kebijakan ingasi, dan d) Masuknya propinsi dan 7 kabupaten dalam studi JICA tahun 2000/2001</li> <li>3) <u>Ari dan pentingnya program</u> : Pemerintah Indonesia merupakan sisi dimana reformasi kebijakan ingasi berasal. Karenanya, berkaitan dengan otonomi daerah dan demokrasi, kesiapan pemerintah Indonesia merupakan hal pertama yang dibutuhkan bagi kabupaten dan kotamadya untuk penyebaran dan pelaksanaan program reformasi kebijakan ingasi.</li> <li>4) <u>Hubungan antara program dan rencana/kegiatan/instruksi pembangunan regional</u> : Program ini harus menjadi tambahan rencana proyek pemerintah Indonesia secara komprehensif yang sedang berjalan (P3DT, KDP dll) serta dukungan bagi ingasi-berkaitan dengan rencana program (PTGA, Rencana Waktual , Rencana Batang Hari , Rencana Batang Anai , dll) di bawah Inpres no. 3/1999 dan Hukum dan Peraturan desentralisasi dan dekonsentrasi</li> </ol>			
<b>(8) Target dan Pengawasan program</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Tujuan Umum</u> : Kesiapan kab/kotamadya pemerintah Indonesia dan ingasi-berkaitan dengan perwakilan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan dan memberi fasilitas yang cukup bagi pelaksanaan reformasi kebijakan ingasi seperti yang dibutuhkan.</li> <li>2) <u>Uraian indikator pencapaian untuk memperoleh hasil pada tingkat target</u> : Kesiapan Kab/Kotamadya Pemerintah Indonesia dan kantor pemerintah Indonesia sektor terkait untuk memulai penyuluhan sesuai jadwal dan memberi fasilitas pelaksanaan PPI dalam DI, Kecamatan dan desa-desa yang terlibat.</li> <li>3) <u>Output</u> : a) Rencana operasi yang sesuai bagi penyuluhan dan pemberian fasilitas pelaksanaan PPI, b) Pembentukan KICF pada tingkat kab/kotamadya c) Materi yang dapat diaplikasikan dan peralatan untuk tujuan penyuluhan dan pemberian fasilitas bagi pelaksanaan PPI d) Sumber daya keuangan yang cukup dan penyusunan bagi tujuan penyuluhan dan penyebaran pelaksanaan PPI e) Jumlah dan kualitas CO yang bagi pelaksanaan PPI f) Kesadaran dan dan kemampuan staf pemerintah Indonesia agar memiliki motivasi pelayanan sipil yang tinggi</li> <li>4) <u>Uraian indikator pencapaian untuk memperoleh peningkatan pada tingkat output</u> : a) Persiapan penyuluhan dan pemberian fasilitas yang sesuai dalam rencana operasi pelaksanaan PPI di 7 kab/kotamadya pada akhir program ini b) Persiapan penyuluhan yang sesuai dan pelaksanaan fasilitas materi dan peralatan di kab/kotamadya pada akhir program ini c) Sumber daya keuangan yang sesuai dan penyusunan bagi penyuluhan dan pemberian fasilitas pelaksanaan PPI di 7 kab/kotamadya pada akhir program ini d) Pembentukan Forum Koordinasi Ingasi Kabupaten (KICF) pada masing-masing kab/kotamadya pada akhir program ini e) TOT yang sesuai bagi PTGA dan kemampuan PTGA untuk melatih CO f) Mempelajari dan melatih CO yang cocok dikelola oleh Univ/LSM Tim Konsultan yang bertanggung jawab terhadap KICF di 7 kab/kotamadya pada akhir program ini g) Uji lapangan kemampuan staf Kab/kotamadya untuk menjadi pelayan masyarakat di 7 kab/kotamadya pada akhir program ini</li> </ol>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>5) <u>Aktivitas</u> <b>Lihat Informasi Pendukung</b></li> <li>6) <u>Asumsi</u> : a) Biaya tersedia b) Reformasi kebijakan ingasi menguntungkan bagi pemakai air c) Alokasi tugas pemerintah pusat dan pemerintah kab/kotamadya dan pemakai air telah dijelaskan dan diterima.</li> </ol>			
<b>(9) Input Program</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Rencana alokasi biaya selama periode program</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membutuhkan perbilant, Pemerintah propinsi dan 7 pemerintah kab dan kotamadya, 1 bulan, 24 orang/bulan</li> <li>- Produk materi dan peralatan untuk penyuluhan dan pemberian fasilitas pelaksanaan PPI, 2 bulan, 40 orang/bulan</li> <li>- TOT bagi PTGA dan 7 kab/kotamadya ter PTGA, 1 pelatihan, 1 minggu, maksimum 30 peserta</li> <li>- Perikutan dan pelatihan bagi CO, 7 kab/kotamadya, 1 CO/DI, prioritas 3 DI per kab/kotamadya (21 CO), 1 minggu perikutan, 1 minggu pelatihan</li> <li>- Memulai KICF, 7 kab/kotamadya, pertemuan bagi penyusunan organisasi dan pembuatan ADHART (1 minggu, 7 x 21 orang/hari), 7 x 1-hari</li> <li>- Pembentukan pertemuan @40 peserta, memulai biaya untuk Sekretariat dan lainnya</li> <li>- Konsultasi bagi individu propinsi dan pemerintah kab/kotamadya dan perwakilan pemerintah Indonesia, KICF dan CO untuk pembentukan</li> <li>- Penyuluhan dan pemberian fasilitas pelaksanaan PPI dan aktivitas yang dijelaskan di atas, 6 bulan, 48 orang/bulan</li> <li>- Overhead, transportasi, komunikasi, akomodasi</li> </ul> </li> </ol>			

2) Rencana alokasi staf dan teknik setelah mencapai tujuan utama ... Tim konsultasi dipindahkan pada akhir program ini, dimana pemerintah provinsi dan kab/kotabandaya dan perwakilan pemerintah terkait, tim PTGA dan KICF mengedukasi tindakan bertahap berdasarkan bentuk penyuluhan dan pemberian fasilitas Rencana Tindakan
3) <b>Keterampilan/keahlian:</b> a) Hukum dan Peraturan terkait (tingkat pusat, provinsi, kab/kotabandaya, kecamatan/desa) dari referensi dan pelaksanaan kebijakan irigasi b) Susunan penjelasan permasalahan irigasi dan P3A serta pemecahannya c) Usulan rencana tindakan dan alokasi tugas di bawah reformasi kebijakan irigasi d) Pengaturan biaya keuangan (appraisal, proposal, approval, disbursement requirements dan mekanisme) e) Manual, instrumen, bentuk-bentuk yang berkaitan dengan finansial, teknik dan kebutuhan administrasi pemerintah Indonesia f) Materi penyuluhan seperti yang dibutuhkan untuk media massa lokal (TV, surat kabar) dan kelompok media (pemas, pertemuan, pelatihan), dll
<b>(10) Keuntungan dan Pengaruh Program</b>
1) <b>Keuntungan langsung &amp; jumlahnya secara pelaksanaan program:</b> (631 pimpinan provinsi dan kab/kotabandaya ) a) Pemerintah provinsi : DPR 2, pemerintah provinsi 3, Bappeda 3, Dinas Pengairan 3, Dinas Pertanian 3, lainnya 5, PTGA 5 = 19 orang b) Pemerintah Kab/Mun : 7(DPR 2, pemerintah provinsi 3, Bappeda 3, Dinas Pengairan 3, Dinas Pertanian 3, lainnya 5, tim PTGA 4, CO 21, KICF 46) = 508 orang 2) <b>Keuntungan langsung &amp; jumlahnya setelah mencapai tujuan utama :</b> (sama dengan di atas) 3) <b>Keuntungan tak langsung:</b> a) Peningkatan lapangan terhadap organisasi pemerintah otonomi daerah : alokasi tugas irigasi ke dalam praktiknya b) Perekrutan Universitas dan LSM untuk tim konsultasi pada tingkat kab/kotabandaya, untuk merancang CO = Headquarter 3, kantor Kab/kotabandaya Tx3 = 24 orang
<b>(11) Proyek/Program terkait ( BSP, IDTO, PTSL, SAL, lainnya)</b>
1) Proyek lain : Tersedia untuk menyediakan informasi akurat. Untuk merealisasikan pengembangan regional
<b>(12) Permintaan Awal</b>
1) Reorganisasi dan definisi pemerintah provinsi dan kab/kotabandaya telah selesai dan dapat dikerjakan, 2) Perwakilan konsultan yang kompeten tersedia untuk menjalankan program ini 3) CO direkrut dengan syarat minimum S1 + 3 tahun berpengalaman dalam bidang masyarakat pedesaan 4) Prioritas diberikan ke maksimal 3 Di per kabupates/kotabandaya berkaitan dengan kriteria penyaringan
<b>(13) Risiko &amp; sensitivitas</b>
<b>(14) Tanda-tanda khusus</b>

Jadwal pelaksanaan : Irigasi-berkaitan dengan Perubahan Prilaku Pemerintah Indonesia

Deskripsi Kerja	Tahun ke-1												Tahun ke-2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Butuh penilaian kapasitas dan perubahan prilaku	■	■																						
2 Rencana penyuluhan dan pemberian fasilitas PPI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3 Produksi penyuluhan dan pemberian fasilitasi materi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
4 Lokakarya dan pelatihan bagi perubahan prilaku pem							■	■																
5 Memulai Forum Koordinasi Irigasi Kabupate (KICF)																								
- Pembentukan & pengabsahan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
- Panduan/kriteria untuk memulai biaya bagi P3A				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
- Panduan/prosedur aplikasi KICF				■	■	■	■	■	■	■	■	■												
6 Pelatihan bagi PTGA							■	■	■	■	■	■												
7 Perekrutan dan pelatihan CO																								

- Catatan 1. Kedua program baik kesadaran masyarakat dan pelatihan P3A yang diusulkan di sini dilakukan sebagai program utama sebelum memulai aktivitas secara nasional
2. Program ini akan dilaksanakan setelah menyelesaikan "Kesadaran Masyarakat pada tingkat pemerintah dan P3A" dalam tahun pertama

**Informasi Pendukung 9 aktivitas (9) Target dan Pengawasan Program : Irigasi berkaitan dengan Perubahan Prilaku Pemerintah Indonesia**

Aktivitas	Hasil yang Diharapkan	Oleh petani/P3A	Oleh pemerintah lokal	Oleh pemerintah pusat	Tim konsultan	Tim kelola CO *)
1 Butuh penilaisan lagi kapasitas pemerintah lokal dan perubahan perilaku bagi pelaksanaan PPI	Prioritas dan jadwal kapasitas pemerintah lokal dan perubahan perilaku		V		TA	
2 Pembentukan rencana pemerintah lokal untuk penyuluhan dan pemberian fasilitas pelaksanaan PPI	Rencana Penyuluhan dan pemberian fasilitas pemerintah lokal untuk pelaksanaan PPI		V		TA	
3 Produksi materi penyuluhan dan pemberian fasilitas pelaksanaan PPI	(1) Metode yang mudah diaplikasikan dan materi untuk penyuluhan pelaksanaan PPI (2) Pedoman yang mudah diaplikasikan dan kebutuhan administrasi bagi pelaksanaan PPI		V		TA	
4 Perubahan perilaku staf pemerintah lokal untuk penyuluhan dan pemberian fasilitas pelaksanaan PPI  4.1 Latakarya tentang perubahan perilaku staf pemerintah 4.2 Pelelahan kerja lagi staf pemerintah lokal	(1) Deskripsi kerja pemerintah lokal, penempilan standar Formulated local Govt Officers' job description, dan prosedur (2) Kemampuan staf lokal pemerintah untuk menerima cukup fasilitas bagi pelaksanaan PPI		V		TA	
5 Memulai Forum Koordinasi Irigasi Kabupaten (KICF) 5.1 Pembuatan konsep naskah KICF 5.2 Pembentukan dan pengabohan KICF dan naskah KICF 5.3 Pembuatan panduan dan kriteria untuk ketentuan memulai biaya OSP untuk P3A 5.4 Pembuatan panduan dan prosedur aplikasi dan penyebaran dari biaya perbaikan irigasi kabupaten	Memulai dan mempersiapkan KICF untuk menjalanin peraturan dan tanggung jawabnya	V	V		TA	
6 Pelatihan staf PTGA 6.1 Rancangan silabus pelatihan/penyegaran 6.2 Pemilihan peserta dari tim PTGA propinsi dan kab/kotamadya 6.3 Ketentuan pelatihan lagi staf PTGA	Kemampuan staf PTGA untuk memberi fasilitas pelatihan CO		V		TA	
7 Penkrutan dan pelatihan CO 7.1 Membuatkan analisis lagi CO 7.2 Rencana dan pembiayaan lagi perekrutan dan pelatihan CO 7.3 Pembentukan CO kebutha minimum dan prosedur rekrutmen 7.4 Penkrutan dan pemilihan CO 7.5 Pelatihan dan pengiriman CO	Jumlah dan kualitas yang cukup dari CO di kabupaten dan kotamadya		V		TA	V

Catatan: Legenda tugas kewajiban

\*) Sndakan oleh Univ/LSM

V : memiliki keluasaan & tanggung jawab KS : operasi gabungan

KM : rekan kerja

TA : bantuan teknik

Program ini akan dilaksanakan setelah menyelesaikan "Kesadaran masyarakat pada tingkat pemerintah & P3A" dalam tahun pertama

Tabel SA.2.1 Inventaris Sistem Irigasi dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)

(1) Aktivitas No. :	INV - 1	Nama Program;	Program Pembaharuan Inventaris Rencana Irigasi Besar		Kategori program
(2) Sektor :	irigasi	(3) Perkiraan periode pelaksanaan;	3 tahun	Rencana Irigasi, P3A, lainnya	
(4) Wilayah Target / Kategori	1) Perkiraan Jumlah Total ;		1,800 schemes	2) Perkiraan Wilayah Total ; 5 propinsi Studi P3A,JICA	
3) Lainnya					
<b>(5) Deskripsi Program</b>					
Melakukan revisi terhadap investasi terakhir dari rencana irigasi di seluruh negeri, berdasarkan inventaris Di 1993. Kondisi sistem irigasi & drainase saat ini dikonfirmasi dengan survei walk through. Survei ini dilaksanakan dengan instruksi top-down, menajudikan insentif dari pusat ke pemerintah propinsi dari bentuk biaya untuk pemeliharaan/rehabilitasi. Sistem Trussik dari sumber air untuk mengalir ke saluran tersier di sepanjang saluran sekunder digabungkan. Tingkat tersier ditalokan.					
<b>(6) Perwakilannya/instansi pelaksana, peraturannya, kondisi saat ini &amp; kekuatan yang dibutuhkan</b>					
1) <u>Tingkat keamanan:</u> Kontraktor yang disewa akan melaksanakan survei konfirmasi walk-through					
2) <u>Pemerintah Kabupaten:</u> Dinas Kab. Kimpraswil					
3) <u>Pemerintah Propinsi:</u> Dinas Kimpraswil, yang berkuasa pada tingkat propinsi, panduan Dinas Kab Kimpraswil					
4) <u>Pemerintah pusat:</u> Yang berkuasa; Kimpraswil, DGMW, DMWFM					
<b>(7) Latar Belakang Program</b>					
1) <u>Permasalahan saat ini yang dituju oleh Program:</u> Hampir semua informasi dari kondisi sistem irigasi dan drainase saat ini tidak cukup untuk menyediakan perkiraan jumlah/biaya untuk pemeliharaan sistem tersebut.					
2) <u>Teknik Usur yang telah diambil:</u> Beberapa pengukuran penting tidak pernah diambil oleh pemerintah pusat					
3) <u>Ari dan peringatnya program:</u> Seperti yang diminta oleh petani kepada pemerintah lokal yaitu menyelesaikan rehabilitasi sebelum penanganannya, pemerintah pusat sebaiknya memperbaharui atau memandu untuk menyediakan referensi dasar bagi aset manajemen sic reference points for sound asset management.					
4) <u>Hubungan sistem program dan rencana kelengkapan/terhadap penaseimbangan nasional:</u> Pemerintah Indonesia akan memproses Program Manajemen Sumber daya air nasional bagi pengembangan BWMF untuk menyediakan referensi yang akurat untuk rencana regional di eraa ibtang. Program yang diusulkan merupakan informasi yang paling berharga untuk membuat rencana regional menjadi konkret, karena sektor irigasi merupakan hal utama bagi pemakai air di lapangan					
<b>(8) Target dan Pengawasan Program</b>					
1) <u>Tujuan Umum:</u> Untuk memalisasikan/menyelesaikan inventaris yang akurat dan dapat menjadi referensi untuk mengidentifikasi bagian yang perlu direhabilitasi dan tersedia untuk mengkurasi perkiraan biaya.					
2) <u>Ukuran indikator penaseimbangan untuk memsemerah hasil pada tingkat target:</u> Menggabungkan inventaris itu sendiri					
3) <u>Output:</u> Menggabungkan inventaris itu sendiri					
4) <u>Ukuran indikator penaseimbangan untuk memsemerah peneliharaan pada tingkat output:</u> Menggabungkan inventaris itu sendiri, termasuk peta berorientasi ke informasi, dan gambar, tidak hanya informasi angka.					
5) <u>Aktivitas</u> <b>Likar Informasi Pendukung</b>					
6) <u>Asumsi</u>					
<b>(9) Input Program</b>					
1) <u>Rencana alokasi biaya selama periode anggaran</u> Rp 74,549.92 (x 1,000,000) = \$6,777.27 (x 1,000) US\$1=Rp11,000					
2) <u>Rencana alokasi staf dan teknik teknik setelah mencapai tujuan umum.</u>					
3) <u>kelebihan perabahan/teknik.</u>					
<b>(10) Keuntungan dan Pengaruh Program</b>					
1) <u>Keuntungan langsung &amp; jumlahnya selama pelaksanaan program:</u> Konsultan swasta (dengan kontrak survei)					
2) <u>Keuntungan langsung &amp; jumlahnya setelah mencapai tujuan umum:</u> Pemerintah lokal ( Kab. & Propinsi)					
3) <u>Keuntungan tak langsung:</u> Petani (dapat untuk mengharapkan rancangan alokasi air 6 juta), pemerintah lokal (dapat untuk memprioritaskan rencana irigasi dan menyimpan pengeluaran), masyarakat desa (karena dapat untuk membeli beras)					
<b>(11) Proyek/Program terkait ( IISP, IDTO, PTSL, SAL, Lainnya)</b>					
1) IDTO, tetapi tidak terkait langsung karena rehabilitasi tingkat tersier					
2) PTSL, dapat untuk memperoleh kondisi sistem irigasi/drainase terakhir walupun tidak mencakup seluruh area proyek					
<b>(12) Permintaan awal</b>					
1) Investasi yang dikembangkan oleh pemerintah propinsi atau inventaris 1993 harus ada					
2) Kesatuan P3A atau petani harus terbentuk					
<b>(13) Resiko dan Kepuasan</b>					
1)					
<b>(14) Tanda-tanda khusus</b>					
1)					

**Informasi Pendukung 5) Aktivitas (3) Target dan Pengawasan Program :  
Program Pembaharuan Inventaris Rencana Irigasi Besar**

Aktivitas	Oleh petani/P3A	Oleh pemerintah lokal	Oleh pemerintah pusat	Oleh konsultan
<b>Fase-1 : Tahap awal/persiapan</b>				
Identifikasi rencana irigasi			V, BU	
(1) Identifikasi rencana irigasi awal		I	V, BU	
(2) Penggabungan rencana irigasi saat ini		I	V, BU	
<b>Fase-2 : Tahap pembaharuan inventaris/penyelesaian</b>				
Konfirmasi kondisi rencana irigasi saat ini			V, BU	
(1) Survei konfirmasi kondisi saat ini	KM	KS	V, BU	I
(2) Pekerjaan penggabungan kondisi saat ini			V, BU	I
(3) Bagan tingkatan Manajemen O&P	KM	KS	V, BU	I

Catatan: Legenda tugas kewajiban

V : memiliki kekuasaan & tanggung jawab

BU: menyediakan panduan/bantuan/dukungan

KS : operasi gabungan

I : pelaksana

KM : rekan kerja

**Jadwal pelaksanaan : Program Pembaharuan Inventaris Rencana Irigasi Besar**

Deskripsi Kerja	Tahun ke-1												Tahun ke-2												Tahun ke-3											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Fase-1 : Tahap awal persiapan</b>	-----																																			
Identifikasi rencana irigasi	-----																																			
(1) Identifikasi rencana irigasi awal	████████████████████												-----																							
(2) Penggabungan rencana irigasi saat ini	████████████████						████████████████						████████████████						-----																	
<b>Fase-2 : Tahap Pembaharuan inventaris/penyelesaian</b>	-----																																			
Konfirmasi kondisi rencana irigasi saat ini	-----																																			
(1) Survei konfirmasi kondisi saat ini	-----												████████████████████												-----											
(2) Pekerjaan penggabungan kondisi saat ini	-----												████████████████						████████████████						-----											
(3) Bagan tingkatan manajemen O&P	-----												-----												████████████████████											

Tabel SA.2.2 Inventaris Sistem Irigasi dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)

(1) Aktivitas No. :	INV - 1	Nama Program;	Program Pembahasan Inventaris Rencana Irigasi Besar		Kategori program
(2) Sektor :	irigasi	(3) Perkiraan periode pelaksanaan;	3 tahun	Rencana Irigasi, P3A, lainnya	
(4) Wilayah Target / Kategori	1) Perkiraan Jumlah Total ;		1,800 schemes	2) Perkiraan Wilayah Total ; 5 propinsi Studi P3A,JICA	
3) Lainnya					
<b>(5) Deskripsi Program</b>					
Melakukan revisi terhadap investasi terakhir dari rencana irigasi di seluruh negeri, berdasarkan inventaris Di 1993. Kondisi sistem irigasi & drainase saat ini dikonfirmasi dengan survei walk through. Survei ini dilaksanakan dengan instruksi top-down, menajutkan insentif dari pusat ke pemerintah propinsi dari bentuk biaya untuk pemeliharaan/rehabilitasi. Sistem Trussik dari sumber air untuk mengalir ke saluran tersier di sepanjang saluran sekunder digabungkan. Tingkat tersier ditalokan.					
<b>(6) Perwakilanelektusi pelaksana, peraturannya, kondisi saat ini &amp; kekuatan yang dibutuhkan</b>					
1) <u>Tingkat keamanan:</u> Kontraktor yang disewa akan melaksanakan survei konfirmasi walk-through					
2) <u>Pemerintah Kabupaten:</u> Dinas Kab. Kimpraswil					
3) <u>Pemerintah Propinsi:</u> Dinas Kimpraswil, yang berkuasa pada tingkat propinsi, panduan Dinas Kab Kimpraswil					
4) <u>Pemerintah pusat:</u> Yang berkuasa; Kimpraswil, DGMW, DMWFM					
<b>(7) Latar Belakang Program</b>					
1) <u>Permasalahan saat ini yang dituju oleh Program:</u> Hampir semua informasi dari kondisi sistem irigasi dan drainase saat ini tidak cukup untuk menyediakan perkiraan jumlah/biaya untuk pemeliharaan sistem tersebut.					
2) <u>Teknik Usur yang telah diambil:</u> Beberapa pengukuran penting tidak pernah diambil oleh pemerintah pusat					
3) <u>Ari dan peringatnya program:</u> Seperti yang diminta oleh petani kepada pemerintah lokal yaitu menyelesaikan rehabilitasi sebelum penanganannya, pemerintah pusat sebaiknya memperbaharui atau memandu untuk menyediakan referensi dasar bagi aset manajemen sic reference points for sound asset management.					
4) <u>Hubungan antara program dan rencana kelengkapan untuk penaseimbangan nasional:</u> Pemerintah Indonesia akan memproses Program Manajemen Sumber daya air nasional bagi pengembangan BWMF untuk menyediakan referensi yang akurat untuk rencana regional di eraa ibtang. Program yang diusulkan merupakan informasi yang paling berharga untuk membuat rencana regional menjadi konkret, karena sektor irigasi merupakan hal utama bagi pemakai air di lapangan					
<b>(8) Target dan Pengawasan Program</b>					
1) <u>Tujuan Umum:</u> Untuk memalisasikan/menyelesaikan inventaris yang akurat dan dapat menjadi referensi untuk mengidentifikasi bagian yang perlu direhabilitasi dan tersedia untuk mengkurasi perkiraan biaya.					
2) <u>Ukuran indikator penaseimbangan untuk memsemerah hasil pada tingkat target:</u> Menggabungkan inventaris itu sendiri					
3) <u>Output:</u> Menggabungkan inventaris itu sendiri					
4) <u>Ukuran indikator penaseimbangan untuk memsemerah peneliharaan pada tingkat output:</u> Menggabungkan inventaris itu sendiri, termasuk peta berorientasi ke informasi, dan gambar, tidak hanya informasi angka.					
5) <u>Aktivitas</u> <b>Liter Informasi Pendukung</b>					
6) <u>Asumsi</u>					
<b>(9) Input Program</b>					
1) <u>Rencana alokasi biaya selama periode anggaran</u> Rp 74,549.92 (x 1,000,000) = \$6,777.27 (x 1,000) US\$1=Rp11,000					
2) <u>Rencana alokasi staf dan teknik teknik setelah mencapai tujuan umum.</u>					
3) <u>kelemban peralihan/teknik.</u>					
<b>(10) Keuntungan dan Pengaruh Program</b>					
1) <u>Keuntungan langsung &amp; jumlahnya selama pelaksanaan program:</u> Konsultan swasta (dengan kontrak survei)					
2) <u>Keuntungan langsung &amp; jumlahnya setelah mencapai tujuan umum:</u> Pemerintah lokal ( Kab. & Propinsi)					
3) <u>Keuntungan tak langsung:</u> Petani (dapat untuk mengharapkan rancangan alokasi air 6 juta), pemerintah lokal (dapat untuk memprioritaskan rencana irigasi dan menyimpan pengeluaran), masyarakat desa (karena dapat untuk membeli beras)					
<b>(11) Proyek/Program terkait ( IISP, IDTO, PTSL, SAL, Lainnya)</b>					
1) IDTO, tetapi tidak terkait langsung karena rehabilitasi tingkat tersier					
2) PTSL, dapat untuk memperoleh kondisi sistem irigasi/drainase terakhir walupun tidak mencakup seluruh area proyek					
<b>(12) Permintaan awal</b>					
1) Investasi yang dikembangkan oleh pemerintah propinsi atau inventaris 1993 harus ada					
2) Kesatuan P3A atau petani harus terbentuk					
<b>(13) Resiko dan Kepekaan</b>					
1)					
<b>(14) Tanda-tanda khusus</b>					
1)					

**Dukungan Informasi & aktivitas (B) Target dan Pengawasan Program :  
Program Pembaharuan Inventaris Rencana Irigasi Skala Kecil**

Aktivitas	Oleh Petani/P3A	Oleh Pemerintah	Oleh Pemerintah	Oleh Konsultan
<b>Fase -1 : Memulai Tahap Persiapan</b>				
Identifikasi Rencana Irigasi			V	
(1) Memulai Identifikasi rencana irigasi		I	V, BU	
(2) Menggabungkan rencana irigasi saat sekarang		I	V, BU	
<b>Fase-2 : Pembaharuan Inventaris/Tahap Penyelesaian</b>				
Konfirmasi Kondisi rencana irigasi saat ini			V, BU	
(1) Survei konfirmasi kondisi saat ini	I	KS	V, BU	
(2) Pekerjaan menggabungkan kondisi saat ini		I	V, BU	
(3) Bagan Tingkatan Manajemen O&P		KS	V, BU	I

Catatan : Legenda kewajiban tugas

V : Memiliki kekuasaan & tanggung jawab

KS : Operasi gabungan

KM : Rekan kerja

BU: menyediakan pedoman/bantuan/dukungan

I : Pelaksana

**Jadwal Pelaksanaan : Program Pembaharuan Inventaris Rencana Irigasi Skala Kecil**

Deskripsi Kerja	Tahun Pertama												Tahun Kedua												Tahun Ketiga																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
<b>Fase-1 : Memulai Tahap Persiapan</b>	-----																																												
Identifikasi rencana irigasi	-----																																												
(1) memulai identifikasi rencana irigasi	-----									-----																																			
(2) menggabungkan rencana irigasi saat ini	-----												-----																																
<b>Fase-2 : Pembaharuan Inventaris/Tahap Penyelesaian</b>	-----																																												
Konfirmasi Kondisi rencana irigasi saat ini	-----																																												
(1) Survei konfirmasi kondisi saat ini	-----												-----																																
(2) Pekerjaan menggabungkan kondisi saat ini	-----												-----																																
(3) Bagan tingkatan manajemen O&P	-----																																												